

**ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI-FRAUD PADA PT. BANK
SYARIAH INDONESIA KCP SEMARANG MT HARYONO**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh:

Nur Awalia Setianingsih (1905036018)

**PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691, Semarang, Kode Pos 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Nur Awalia Setianingsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah Skripsi saudara :

Nama : Nur Awalia Setianingsih

NIM : 1905036018

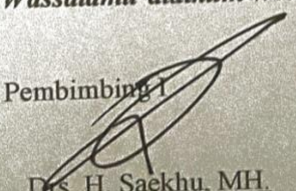
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Judul Skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI-FRAUD
PADA PT BANK SYARIAH INDONESIA KCP
SEMARANG MT HARYONO.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

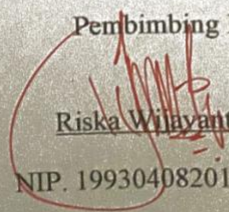
Pembimbing I


Drs. H. Saekhu, MH.

NIP. 196901201994031004

Semarang, 14 Desember 2022

Pembimbing II


Riska Wilayanti, S.H.

NIP. 199304082019032019

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus 3 Ngaliyan Semarang 50185. Telp./Fax. : (024) 7608454
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Nur Awalia Setianingsih
NIM : 1905036018
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI FRAUD PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP SEMARANG MT HARYONO**

Telah di ujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude pada tanggal : **29 Desember 2022.**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023

Semarang, 29 Desember 2022

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang,

Suhirman, M.A., Ek.
NIP. 198412122019031010

Penguji Utama I,

Fita Nurotul Faizah M.E.
NIP. 199405032019032026

Pembimbing I,

Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP. 196901201994031004

Sekretaris Sidang,

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 197601092005011002

Penguji II,

Warno, S.E., M.Si.
NIP. 198307212015031002

Pembimbing II,

Riska Wijayanti, M.H.
NIP. 199304082019032019



MOTTO

Ilmu terbaik adalah yang diamalkan. Waktu terbaik, yang dioptimalkan. Cinta terbaik, yang dihalalkan. Harta terbaik, yang disedekahkan. Manusia terbaik, yang bermanfaat bagi manusia lain.”

-Ahmad Rifa'i Rif'an-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan rasa syukur kepada Tuhan SWT segara karunia maupun hidayah-nya yang telah memberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir. Serta tugas akir ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya Almarhum Bapak H.Nurdin dan Ibu Hj.Fatmawati Amir yang sudah membesarkan, merawat, mendidik dan selalu memberikan doa serta mendukung saya dengan kasih sayang sepenuh hati.
2. Adik saya Nur Alviana, Nur Ainun, dan Nur Khaerati Jannah yang selalu memberikan saya semangat. Semoga kita semua bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat untuk selalu membuat Ayah dan Bunda bangga tersenyum bahagia melihat kita anak-anak nya.
3. Wali Dosen saya Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bimbingannya dengan penuh kesabaran selama perkuliahan.
4. Dosen pembimbing saya Bapak Drs. H. Saekhu, M.H, dan Ibu Riska Wijayanti, M.H. yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dengan penuh kesabaran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Sahabat-sahabat saya Zaenul Abidin, Magevira, Muhammad Adam, Ryan Arsandi, Fitra Hardiana, Muhammad Dzulqarnain Lambogo, Muh. Asyraf Ali Fikri, Fitrah Fachrayhan, Tariza Azzahra, Nabila Samak, Iin Kasdaryati, Ayu Lestari, Fitratun Nafsiah, Ria Oktaviani, Hamdan Salahuddin, Fathirah Putri Ananda Nurhamnah, dan Andi Putri Djemma yang selalu membantu saya dalam keadaan apapun.
6. Teman-teman seperjuangan dan adik-adik organisasiku dari HMJ S1 Perbankan Syariah, DEMA FEBI UIN Walisongo Semarang, IKSI, dan PMII Rayon Ekonomi UIN Walisongo Semarang yang sudah memberikan pelajaran dalam berorganisasi dan berproses Bersama.
7. Almamaterku tercinta UIN Walisongo Semarang, semoga selalu jaya dan semakin berkualitas

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Awalia Setianingsih

NIM : 1905036018

Jurusan/Program Studi : S1 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“Analisis Implementasi Strategi Anti-Fraud Pada Pt. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono.”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 8 Desember 2022

Deklarator,



Nur Awalia Setianingsih

NIM: 1905036018

PEDOMAN TRANSLITERASI

HURUF ARAB KE LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam penulisan skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = 'a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h

د = d	ع = ‘	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَو = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambang dengan konsonan ganda, misalnya الطب *al-thibb*.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al-* ... misalnya الصناعة = *al - shina'ah*. *Al* – ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan “h” misalnya المعيشة الطبيعية = *al - ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Fraud adalah orang-orang dari dalam atau luar organisasi melakukan tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja (seperti memanipulasi atau memberikan informasi palsu kepada pihak ketiga) untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, yang dapat merugikan pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan *Report The Nation 2019 ACFE Indonesia fraud* dalam industri keuangan dan perbankan sebanyak 41.4% dan tercatat sebagai industry tertinggi dari industry lainnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.

Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono telah melaksanakan strategi anti *fraud* sesuai dengan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 1 Januari 2020, tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum.” Adapun Strategi yang diimplementasikan oleh BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu sosialisasi ke cabang-cabang, melakukan *Fraud Risk Assessment*, serta implementasi *Whistleblowing System*. Upaya dalam mengembangkan kompetensi SDM di BSI KCP Semarang MT Haryono, surpa pemberian latihan, tugas, serta pengawasan terhadap pencarian SDM dalam meningkatkan kinerja untuk menghindari “*occupational fraud*”. Kendala yang dihadapi BSI KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalisir terjadinya *fraud* yaitu SDM yang terbatas, pelatihan tidak menyeluruh, bahkan SDM ada yang tidak mendapatkan pelatihan mendasar serta tidak punya “struktur *fraud* khusus”. Adapun peningkatan yang harus dilakukan dalam meminimalisir *Fraud* di BSI KCP Semarang MT Haryono adalah Merekrut SDM Anti *Fraud*, megefektifkan pelatihan secara keseluruhan, dan membuat struktur organisasi Unit Anti *Fraud* BSI KCP Semarang MT Haryono.

Kata Kunci : Implementasi, Strategi Anti-Fraud , dan Perbankan Syariah

ABSTRACT

Fraud is people from inside or outside the organization who take illegal actions that are done intentionally (such as manipulating or providing false information to third parties) to benefit themselves or their group, which can harm third parties directly or indirectly. Based on The Nation's 2019 ACFE Indonesia Report, fraud in the financial and banking industry was 41.4% and was recorded as the highest in the industry compared to other industries. This research is a type of qualitative research using the case study method.

The results of this study are that Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono has implemented an anti-fraud strategy in accordance with Financial Services Authority Regulation No. 39/POJK.03/2019 dated 1 January 2020, concerning Implementation of Anti-Fraud Strategy for Commercial Banks. The strategy implemented by BSI KCP Semarang MT Haryono is socialization to branches, conducting a Fraud Risk Assessment, and implementing a Whistleblowing System. Efforts to develop HR competencies at BSI KCP Semarang MT Haryono, in the form of training, assignments, supervision and HR recruitment processes regarding performance improvement carried out in detecting and preventing occupational fraud. The obstacles faced by BSI KCP Semarang MT Haryono in minimizing the occurrence of fraud are limited human resources, uneven training, after basic training there are several human resources who have not received training for a long time and do not have a special fraud structure. The improvements that must be made in minimizing fraud at BSI KCP Semarang MT Haryono are Recruiting Anti-Fraud HR, making training effective as a whole, and creating an organizational structure for the BSI KCP Semarang MT Haryono Anti-Fraud Unit.

Keywords: Implementation, Anti-Fraud Strategy, and Islamic Banking

KATA PENGANTAR

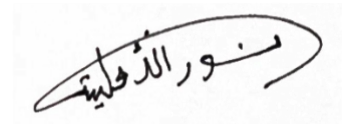
Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya dan tak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul **Analisis Implementasi Strategi Anti-Fraud Pada Pt. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono**. Skripsi ini merupakan tugas akhir Program studi S1 Perbankan Syaria'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan atas dukungan, bimbingan, serta arahan dan doa dari semua pihak. Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para wakilnya.
3. Bapak Dr. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ibu Heny Yuningrum, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syaria'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Ibu Muyassarrah, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi S1 Perbankan Syaria'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Bapak Drs. H. Saekhu, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Riska Wijayanti, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu memberikan arahan, masukan, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran selama penyusunan skripsi.
7. Ibu Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag., selaku Wali Dosen yang selalu sabar memberikan arahan dengan baik selama perkuliahan.
8. Seluruh dosen Program Studi S1 Perbankan Syaria'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang selama ini telah mengamalkan

pengetahuan, ilmu, dan wawasan untuk membekali penulis di masa depan. Semoga semua amal baik yang sudah diberikan akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan saran dan kritikan yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Harapan akhir penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca dan mempelajarinya.

Semarang, 22 Desember 2022

Penulis

A handwritten signature in Arabic script, enclosed in a hand-drawn oval. The signature appears to be 'نور الدنيا' (Nur Ad-Dunya).

Nur Awalia Setianingsih

NIM.1905036018

DAFTAR ISI

<u>PERSETUJUAN PEMBIMBING</u>	xi
<u>PENGESAHAN</u>	xii
<u>MOTTO</u>	xiii
<u>PERSEMBAHAN</u>	xiv
<u>DEKLARASI</u>	xv
<u>PEDOMAN TRANSLITERASI</u>	xvi
<u>ABSTRAK</u>	xviii
<u>ABSTRACT</u>	xix
<u>KATA PENGATAR</u>	xx
<u>DAFTAR ISI</u>	xxii
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	xxiv
<u>BAB I</u>	1
1.1. <u>Latar Belakang</u>	1
1.2. <u>Rumusan Masalah</u>	5
1.3. <u>Tujuan Penelitian</u>	5
1.4. <u>Manfaat Penelitian</u>	6
<u>1.4.1. Bagi peneliti</u>	6
<u>1.4.2. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono</u>	6
<u>1.4.3. Bagi pihak lain</u>	6
1.5. <u>Tinjauan Pustaka</u>	6
1.6. <u>Metode Penelitian</u>	8
<u>1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian</u>	8
<u>1.6.2. Sumber Penelitian</u>	9
<u>1.6.3. Subjek dan Objek Penelitian</u>	10
<u>1.6.4. Metode Pengumpulan Data</u>	10
<u>1.6.5. Teknik Analisis Data</u>	12
<u>1.6.6. Uji Kredibilitas Data</u>	14
1.7. <u>Sistematika Penulisan</u>	14
<u>2.1. Fraud</u>	16
<u>2.1.1. Pengertian Fraud</u>	16
<u>2.1.2. Fraud dalam Islam</u>	17
<u>2.1.3. Perkembangan Fraud di Indonesia</u>	20
<u>2.1.4. Klasifikasi Fraud</u>	21
<u>2.1.5. Pelaku Fraud</u>	22
<u>2.1.6. Tanda-Tanda perilaku Fraud</u>	23
<u>2.1.7. Fraud Triangle</u>	24
<u>2.1.8. Pendekatan Fraud</u>	26
2.2. <u>Strategi Anti Fraud</u>	28
<u>2.2.1. Pencegahan</u>	29
<u>2.2.2. Deteksi</u>	33
<u>2.2.3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi</u>	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	36
2.3. Profil PT. Bank Syariah Indoensia Kantor Cabang Pembantu Semarang MT Haryono	
36	
2.4. Visi dan Misi	36
2.5. Struktur Organisasi	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
4.1. Mekanisme Implementasi Strategi Anti-Fraud Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono	39
4.1.1. Adanya SOP dan Unit Khusus yang menangani Fraud	39
4.1.2. Upaya Pencegahan Fraud	41
4.1.3. Upaya Pendeteksian Fraud	43
4.1.4. Upaya Investigasi, pelaporan, dan sanksi	44
4.1.5. Upaya Pengawasan dan tindak lanjut Fraud	46
4.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono	
48	
4.2.1. Sumber Daya Manusia	49
4.2.2. Pelatihan untuk karyawan	50
4.2.3. Pengembangan SDM Anti Fraud	50
4.3. Kendala yang dihadapi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan terjadinya fraud	51
4.3.1. Kekurangan SDM Tim Anti Fraud	51
4.3.2. Pelatihan Belum Sepenuhnya Efektif	52
4.3.3. Tidak mempunyai struktur organisasi fraud tersendiri	52
4.4. Peningkatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan terjadinya fraud	52
4.4.1. Merekrut SDM Anti Fraud	53
4.4.2. Mengefektifkan Pelatihan secara keseluruhan	54
4.4.3. Membuat struktur organisasi unit Anti Fraud	54
4.4.4. Mengefektifkan dalam mengidentifikasi kerawanan	55
BAB V PENUTUP	57
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Keterbatasan Penelitian	58
5.3. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	65
Daftar Pertanyaan Wawancara	65
Narasumber Dua	69
Narasumber Ketiga	73
Narasumber Keempat	78
Surat Izin Riset Dan Surat Penerimaan Riset	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. RTTN 2019.....	3
Gambar 2.1. <i>Report To the Nations</i> ACFE 2019.....	23
Gambar 3.1. Struktur organisasi BSI KCP Semarang MT Haryono.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSI <i>Kantor Wilayah VII Semarang Unit Anti Fraud</i>	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbankan Syariah adalah suatu lembaga mengurus uang sudah berkembang pesat dan baik di suatu negara maju dan negara berkembang. Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat besar bagi perekonomian negara. Seiring berjalannya perkembangan teknologi di Negara kita yaitu Indonesia, tentunya kita dihadapi berbagai tantangan yang berhubungan dengan masalah apapun terutama yang dapat merugikan negara dan sumber daya manusianya.

Bank Syariah di Indonesia yang sangat penting yaitu melihatkan indetitas sebagai bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun, hingga saat ini, berbagai kontroversi yang telah muncul di kalangan masyarakat. Salah satu masalah yang paling menjadi pusat perhatian di kalangan masyarakat adalah pelekatan atau pelafalan label “Syariah” dan mengacu pada institusi keuangan Islam yang hingga sampai saat ini masih belum layak dilabel mengenai hal tersebut.

Segala keraguan masyarakat mengenai hal tersebut, terjawab oleh berbagai masalah-masalah yang terjadi lembaga keuangan syariah atau bank syariah. Salah satu masalah atau problem yang sangat menggemparkan di kalangan masyarakat sekarang adalah terjadi kecurangan (*fraud*) di lembaga keuangan syariah atau di bank syariah. Telah kita ketahui bahwa melakukan kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan tidak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip syariah. Selain itu hal tersebut juga tidak dapat memberikan manfaat dan merugikan bagi suatu perusahaan baik dari internal maupun eksternal, bagi orang lain, dan bagi diri sendiri.

Peraturan perundang-undangan anti *Fraud* harus disiapkan guna menghentikan kerugian perbankan di Indonesia akibat maraknya *Fraud* di industri perbankan di Indonesia akhir-akhir ini. Dalam hal *Fraud* pendeteksi simpanan, Indonesia sering mengalaminya. Bank Indonesia yang bertanggung jawab mengawasi perbankan di Indonesia menjatuhkan sanksi untuk mengatasi hal tersebut. Bank Indonesia akan men-sanksi pada pihak bank yang memiliki permasalahan, termasuk pembatalan kredit serta tidak boleh sementara penerimaan nasabah prioritas. Mungkin juga dilarang

selama satu tahun untuk membuka cabang¹.

Bank Indonesia harus memiliki “Peraturan Bank Indonesia (PBI)” untuk kasus *Fraud* yang berulang tahun ke tahun di sektor perbankan Indonesia. Pertama, ada fase pencegahan, yang mencakup peningkatan tata kelola, pengawasan manajemen proaktif, dan penggunaan pendekatan pengetahuan karyawan Anda. Kedua, langkah deteksi meliputi pelaporan, *Fraud* data, dan mekanisme *whistleblowing*. Tahap ketiga adalah tahap investigasi, yang meliputi penerapan sanksi, penilaian kelemahan sistem, dan standar investigasi. Tahap monitoring yang sekaligus mengevaluasi penilaian dan selera terhadap risiko *Fraud* yang terjadi di bank adalah tahap keempat².

Fraud didefinisikan sebagai tindakan atau ketidakjujuran untuk mendapatkan uang, harta, atau milik orang lain yang sah³. Sebaliknya, *Fraud* adalah tindakan memperkaya diri dengan cara tidak jujur dalam memperoleh materi atau bisnis secara tidak adil. Tekanan, kesempatan, dan penalaran adalah tiga faktor yang memotivasi orang untuk melakukan kecurangan.

Tekanan yang dimaksud adalah jenis ketegangan yang dialami orang baik secara internal maupun eksternal, seperti tekanan keuangan atau tekanan kerja, yang mendorong mereka untuk terlibat dalam perilaku tidak jujur dalam upaya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Peluang dalam konteks ini mengacu pada kemungkinan terlibat dalam perilaku curang dalam perusahaan karena kontrol internal yang lemah. Ketika seorang pegawai perusahaan memiliki masa kerja yang panjang sehingga dapat menerima gaji atau bonus yang lebih besar dari sekarang, misalnya, pembenaran yang dimaksud adalah pelakunya mencari kebenaran atas kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, menerapkan rencana anti-*Fraud* sangat penting untuk mengurangi kerugian bagi perusahaan perbankan dalam kasus *Fraud*.

Contoh kasus *Fraud* yang pernah terjadi di Indonesia adalah Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan perbankan merugi Rp 4,62 triliun akibat kecurangan atau penipuan dalam proses digitalisasi. Hal ini disebabkan keseriusan ancaman dan perkembangan metode transaksi elektronik termasuk e-commerce. Slamet Edy Purnomo, sebagai Wakil Ketua Komite Pengawasan Perbankan Ketiga, mengatakan hasil triwulan I 2020 akan meningkat secara kumulatif sebesar Rp1,8 triliun, dan pada triwulan kedua akan meningkat secara kumulatif sebesar Rp202

¹ Andi Yassha Malpa Zahara and Novita, “Crowe’s *Fraud* Pentagon Dalam Mengindikasikan Kecurangan Laporan Keuangan,” *E-Prosiding Akuntansi* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.

² Fransiska Tarasita Asmara, “KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI *FRAUD*: STUDI PADA PT BANK UOB INDONESIA” (2001): 1–22.

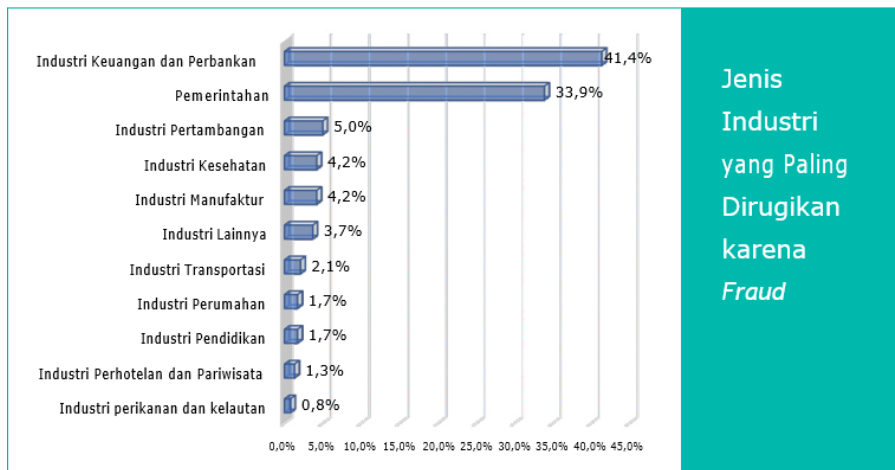
³ Amararenggana Dharmesti Ali Djamhuri, “Peran Teknologi Informasi Dalam Mengantisipasi Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT XYZ Tbk),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2017): 1–10.

miliar sebesar Rp28.200. Ada 1.005 penipuan lingkungan. Secara internal, turun menjadi 796 pada kuartal kedua tahun 2020. Sementara itu, kasus *fraud* akibat lingkungan eksternal perbankan meningkat menjadi 8.218 kasus pada kuartal kedua 2020. 6.444 insiden pada Q1 2020.

Selain itu, Pada tahun 2013, Bank Syariah Mandiri tersangkut kasus *fraud* hal itu dilakukan Manajer Kantor Pusat BSM Bogor, Pemimpin Cabang BSM Bogor, dan Akuntan BSM Bogor setelah polisi menemukan adanya penyelewengan dana. Data awal menunjukkan penyimpangan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada 197 nasabah virtual dengan total aset Rp 102 miliar, dengan potensi kerugian Rp 59 miliar.⁴

Di sisi lain, pada Desember 2020, transaksi tunai melalui ATM atau kartu debit mencapai Rp552 juta. Pada Juli 2021, angka ini akan turun menjadi Rp 518 juta. Sementara itu, penarikan tunai sebesar Rs 726 crore pada Desember 2020 diturunkan menjadi Rs 677 crore pada Juli 2021 dan pinjaman mobile bank dilunasi pada Q1 2021. Pinjaman bank naik 0,50% menjadi Rp 5.564 triliun pada Juli 2021 dari Rp 5.482 triliun setahun sebelumnya.

Gambar 1.1. RTTN 2019



Dari tabel Gambar 1.1 ini memperlihatkan mengenai kerugian yang diakibatkan oleh *fraud* merupakan perusahaan keuangan serta bank sebesar 41.4%. bahkan penelitian ACFE pada 2018 dengan judul “*Report to The Nations 2018*” memperlihatkan bahwa perusahaan keuangan serta bank diposisi paling atas dalam kerugian disebabkan *fraud*. Berbeda dengan “*Survei Fraud Indonesia 2016*” bahwa bisnis keuangan dan bank pada posisi dua sebagai perusahaan yang rugi disebabkan *fraud*.

⁴ <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-syariah-mandiri-bogor-dibobol-kepala-cabang>, diakses pada tanggal 4/12/2022 pk. 16.57 WIB.

Kasus *Fraud* merupakan kasus yang terjadi tidak hanya di negara Indonesia saja, akan tetapi di beberapa negara juga pernah mengalami hal yang serupa. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di Amerika juga merupakan salah satu masalah yang besar yaitu Menurut laporan tahun 2008 oleh American Association of Certified Examiners (ACFE), industri perbankan adalah korban penipuan terbesar. Dari 905 kasus yang diselidiki pada tahun 2007 dan awal 2008, 132 kasus terjadi di sektor perbankan, dengan kerugian rata-rata \$250.000 per kasus. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan bahwa terdapat 39 kasus kejahatan perbankan di Indonesia pada tahun 2007, dimana 524 di antaranya dirujuk ke lembaga penegak hukum. Peningkatan kasus 44% dibandingkan tahun 2006⁵.

Dedikasi entitas keuangan untuk mencegah *Fraud* ditunjukkan oleh strategi anti-*Fraud* nya. Manajemen harus memobilisasi sumber daya sebagai bagian dari strategi pengendalian *Fraud* agar sistem pengendalian *Fraud* dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan. Pencegahan *Fraud*, deteksi, investigasi, dan teknik peningkatan sistem. Empat pilar membentuk strategi anti-*Fraud* , Pencegahan sebagaimana tertuang dalam “Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP/9 Desember 2011” , yang memuat tools untuk mengurangi kemungkinan terjadinya *fraud*, antara lain anti-*fraud* awareness, vulnerability advisory, dan know-your-employee. Berikutnya adalah deteksi, yang mencakup alat untuk mengidentifikasi dan mendeteksi insiden penipuan dalam aktivitas perbankan, termasuk kebijakan dan mekanisme whistleblowing, audit mendadak, dan sistem pemantauan (Asmara, 2020).

Item berikutnya adalah investigasi, pelaporan dan sanksi, termasuk alat untuk mengumpulkan informasi, sistem pelaporan dan sanksi dalam kasus penipuan bank, termasuk investigasi standar, mekanisme pelaporan dan sanksi, dan terakhir pengawasan. Penilaian dan tindakan adalah bagian dari sistem anti-*fraud*, termasuk pelacakan penipuan dan langkah-langkah penilaian dan mekanisme tindak lanjut.

Bank *Syariah* telah menerapkan teknik anti *Fraud* yang sesuai dengan standar Bank Indonesia, sehingga tidak hanya bank konvensional yang menerapkan strategi anti *Fraud* di industri perbankan. Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono merupakan salah satu bank *Syariah* yang menerapkan strategi anti *Fraud* . Bank *Syariah* yang merupakan anak perusahaan Bank Mandiri ini dikenal dengan nama Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT

⁵ Theresa Festi, Andreas, and Riska Natariasari, “Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan,” *Jom Fekom* Vol.1, No., no. 2 (2014): 1–16, <https://media.neliti.com/media/publications/33470-ID-pengaruh-peran-audit-internal-terhadap-pencegahan-kecurangan-studi-empiris-pada.pdf>.

Haryono. Sebagai bagian dari dedikasi untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik, Bank Syariah Mandiri telah menggunakan sistem *whistleblower* sejak tahun 2010. Dengan pola pemantauan menyeluruh yang mencakup seluruh pekerja dan pihak luar, Whistleblowing Indonesia atau dikenal dengan B-Wise untuk deteksi dini pelanggaran dan pencegahan pelanggaran oleh pihak internal. Semua pihak yang berinteraksi dengan BSM diharapkan merasa aman berkat sistem ini, yang juga bertujuan untuk mengurangi kejadian dan kasus *Zero Fraud*.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis implementasi strategi anti *fraud* dalam bisnis jasa keuangan pada masyarakat adalah organisasi cukup rawan terhadap kasus *fraud*. Studi ini dilakukan untuk melihat secara pasti bagaimana jasa keuangan yang dipilih dalam menjalankan maupun cara meminimalisir *fraud*. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono merupakan bank umum syariah yang telah mengikuti kebijakan strategi anti *fraud* yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia. Disisi lain, penelitian ini juga dilaksanakan untuk mengetahui upaya dalam mengembangkan kompetensi SDM unit anti *fraud*, kendala yang ditemui oleh unit anti *fraud* untuk meminimalkan *fraud*, sehingga peningkatan SDM dan sarana prasarana apa yang harus dilakukan dalam meminimalisir terjadinya *fraud*. Sehingga penelitian ini mendefinisikan subjek penelitian adalah Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono. Sehingga judul dalam penelitian ini adalah **“Analisis Implementasi Strategi Anti-Fraud Pada PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut :

- 1.2.1. Bagaimana mekanisme implementasi strategi anti *Fraud* pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono ?
- 1.2.2. Bagaimana pengembangan SDM pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan *fraud* ?
- 1.2.3. Apa kendala yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan *Fraud*?
- 1.2.4. Bagaimana peningkatan yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan *Fraud*?

1.3. Tujuan Penelitian

Sementara dari penelitian ini diharapkan memiliki tujuan sebagai berikut:

Untuk mengetahui mekanisme implementasi strategi anti *Fraud* pada Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono

1.3.1. Untuk mengetahui cara pengembangan SDM pada Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono dan Unit Anti *Fraud*nya.

1.3.2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Unit Anti *Fraud* dalam meminimalkan *Fraud* di Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono

1.3.3. Untuk mengetahui peningkatan yang dapat dilakukan oleh Unit Anti *Fraud* dalam meminimalkan *Fraud* Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono baik dari sisi SDM nya ataupun sarana dan prasarannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut ini:

1.4.1. Bagi peneliti

Kajian ini dapat dimanfaatkan untuk menggali lebih dalam dan menawarkan pemahaman tentang bagaimana taktik anti *Fraud* diterapkan di perbankan (Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono).

1.4.2. Bagi Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono

Temuan penelitian ini dapat membantu Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono memperkuat program strategi anti *Fraud* untuk mengurangi job *Fraud* dan mengurangi tantangan yang dihadapi tim anti *Fraud* .

1.4.3. Bagi pihak lain

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau memberikan informasi lebih lanjut kepada pihak lain tentang penerapan program strategi pemberantasan *Fraud* di Bank *Syariah* Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam rangka mengurangi *Occupational Fraud*.

1.5. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan dan menulis penelitian ini, peneliti telah mengetahui dan berpedoman pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan dalam makalah ini. Sebelum penelitian ini, penulis juga berkonsultasi dengan beberapa literatur, belum ada yang membahas analisis implementasi strategi anti *fraud* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono, namun ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan analisis implementasi strategi anti *fraud*, antara lain :

- 1.5.1. Gina Sakinah dan Ade Ponirah (2021) yang berjudul “Penerapan *Whistleblowing system* Terhadap Internal *Fraud* Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK Periode 2015-2019” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan hasil analisis menunjukkan bahwa masih terdapat tingkat internal *Fraud* yang cukup tinggi dari tahun 2015 hingga 2016 kasus paling tinggi yaitu pada tahun 2016 fluktuatif hingga tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa *whistleblowing system* yang diterapkan belum optimal. Karyawan masih belum mempunyai rasa efek jera jika melakukan tindakan tersebut, serta Sistem perbankan yang kurang efektif serta rendahnya pengawasan dari pihak internal dan eksternal menjadi kesempatan besar untuk melakukan kejahatan.
- 1.5.2. Laksmidewi (2017) “Evaluasi Implementasi Strategi Anti *Fraud* (Studi Pada PT Bank Bukopin Tbk.)” mengatakan tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu tentang strategi pencegahan penipuan PT Bank Bukopin Tbk. Kami menggunakan metode kualitatif untuk mencegah, mendeteksi, menyelidiki, dan melaporkan penipuan. Data diperoleh dengan teknik wawancara dan dianalisis dengan data sekunder dari berbagai sumber. Hasil temuan menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Bank Bukopin telah mencapai empat pilar strategi anti fraud yang tertuang dalam Surat Bank Indonesia No. 13/28/DPNP. Keunggulan Bank Bukopin dalam langkah-langkah anti-fraud dapat dilihat dari keberhasilan strategi-strategi seperti kampanye triwulanan, materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan, kontak langsung dengan SKAI, penilaian risiko fraud, audit mendadak dan sistem *whistleblowing*. bisa lakukan.
- 1.5.3. Chairunnisa & Ibrahim (2019) “Evaluasi Penerapan Strategi Anti *fraud* dalam Mengelola Risiko Kecurangan pada PT X” Riset ini bertujuan untuk Menganalisis gap antara strategi anti-fraud yang diterapkan oleh PT X dan Kerangka Panduan

Manajemen Risiko Fraud COSO. PT X, perusahaan manufaktur pemasok beton cair, menghadapi risiko penipuan yang signifikan karena besarnya bisnisnya di industri konstruksi. Beberapa penipuan yang terjadi seperti pencurian truk mixer bahan bakar solar, pencurian uang karyawan dan pemasar penyalahgunaan aset perusahaan dan kegiatan kriminal lainnya telah memaksa PT X untuk mengambil langkah proaktif untuk mengurangi risiko penipuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan metode penelitian masalah. Informasi yang diolah dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk informasi primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi serta studi literatur.

1.5.4. Fransiska Tarasita Asmara (2020) “Kebijakan Dan Implementasi Strategi Anti *Fraud* : Studi Pada PT Bank UOB Indonesia” Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi kasus yang menghasilkan bahwa kebijakan dan Penerapan Strategi Anti Fraud Jurnal Riset dan Ilmu Akuntansi e-ISSN: 2460-0585 2 Sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud pada Bank Umum , tetapi selalu tanpa Kelemahan yang disebabkan oleh hambatan implementasi, yaitu kurangnya kesadaran di antara staf untuk melaporkan tanda-tanda kecurangan, pergantian staf yang sangat rendah, dan informasi dari audit mendadak seringkali tidak dirahasiakan.

1.5.5. Hanif Rizki Ardianto (2020) “Strategi Pengembangan Unit Anti *Fraud* PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta Dalam Meminimalkan *Occupational Fraud*”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus kualitatif dan hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat celah dan hambatan dalam penerapan mekanisme strategi anti fraud di PT Bank Syariah Mandiri cabang Yogyakarta antara lain keterbatasan tenaga, kurangnya kegiatan pelatihan dan rasa tanggung jawab. keengganan untuk melaporkan kepada rekan kerja.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Di dalam sebuah penelitian tentunya harus mempunyai metode sebagai alatnya. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode studi kasus. Ketika menggunakan metode studi kasus, peneliti melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu program, peristiwa, proses, atau aktivitas dari satu atau lebih subjek (Sugiyono, 2011). Kasus yang dipelajari terikat waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan data secara rinci selama periode waktu yang berurutan menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda (Creswell, 2009).

Diawali dengan pertanyaan di awal penelitian: “Bagaimana mekanisme penerapan strategi anti fraud PT. Bank Syariah Indonesia?” Peneliti berharap dapat menemukan jawaban atas pengajuan tersebut melalui serangkaian prosedur yang dilakukan selama proses pengumpulan data. Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif adalah peneliti meneliti pada bagian implementasi mekanisme atau SOP strategi anti *fraud* PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono.

1.6.2. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data mentah adalah data yang diperoleh, diamati dan direkam langsung dari sumbernya, seperti wawancara, pengamatan dan catatan.⁶ Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dengan melakukan wawancara kepada karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono bagian Unit Anti *Fraud* dan bagian operasional. Dalam Penelitian ini peneliti memiliki beberapa Pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti siapa yang diyakini paling tahu apa yang kita harapkan, atau siapa yang cenderung menjadi penguasa, dapat memudahkan seorang peneliti untuk mengeksplorasi objek/situasi sosial yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data-data yang dapat menunjang data primer. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.⁷ Data sekunder yang diperoleh adalah dari sebuah situs internet, ataupun dari sebuah referensi yang sama dengan apa yang sedang diteliti oleh

⁶ Elisa Badriah Asep Nurwanda, “Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 68–75, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3313/pdf>.

⁷ Diding Bajuri, “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 1 (2013): 145–170.

penulis.⁸ Dalam penelitian ini, merupakan pendukung dari data primer dalam mendeskripsikan hasil penelitian yang berupa buku, jurnal, Peraturan Bank Indonesia, dan website resmi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BSI (Bank Syariah Indonesia).

1.6.3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi, apalagi sampel. Populasi atau sampel dalam metode kualitatif lebih tepat disebut sebagai sumber data dalam situasi sosial tertentu (Djam'an Satori, 2007:2). Spradley (Sugiyono, 2011: 297) menyatakan bahwa situasi sosial atau situasi sosial terdiri dari tiga unsur, yaitu: tempat, partisipan, dan aktivitas kolaboratif..

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah sesuai dengan saran dan persetujuan dari peneliti dan pimpinan dari BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu karyawan dari BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu pada karyawan divisi bagian operasional, *marketing regular*, dan anti *fraud*.

b. Objek Penelitian

Peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di salah satu Bank Umum Syariah yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono yang berlokasi di Jl. MT Haryono N0.657 Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan. Pemilihan sektor industri perbankan sebagai objek penelitian utama didasari oleh Report to The Nations ACFE tahun 2019 yang menyatakan bahwa sektor perbankan dan jasa keuangan memiliki frekuensi yang tertinggi atas terjadinya kasus *fraud* di tahun 2019, dengan presentase sebesar 41.4%. % diantara sektor industri lainnya.⁹ Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono telah memberlakukan strategi anti-*fraud* sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 1 Januari 2020.

1.6.4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang akurat

⁸ M Sari, M. S., & Zefri, "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura," *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 308–315, <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583>.

⁹ <http://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVAI-FRAUD-INDONESIA-2016.pdf>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pada pukul 14.11 WIB.

untuk penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Pengamatan adalah bagian dari pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan (Semiawan, 2010). Dalam karya Zainal Arifin (Kristanto, 2018), observasi adalah proses pengamatan terlebih dahulu kemudian secara sistematis, logis, objektif dan rasional merekam berbagai fenomena dalam situasi nyata dan artifisial. Dalam pengumpulan data observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu *participation observation* dan *non participation*. *Participation observation* merupakan dimana peneliti mengikuti apa yang dilakukan oleh sumber data, dengan tujuan agar data yang didapatkan lebih lengkap dan jelas. Sedangkan *non participant* merupakan dimana posisi peneliti sekedar pengamat yang selanjutnya meringkas dalam sebuah catatan. Observasi pada penelitian ini adalah, peneliti mengobservasi mekanisme implementasi strategi anti *fraud* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono.

b. Metode Wawancara

Wawancara dalam penelitian kualitatif adalah percakapan yang bertujuan yang didahului oleh beberapa pertanyaan informal. Wawancara penelitian lebih dari sekadar percakapan dan dapat berkisar dari informal hingga formal. Sementara semua wawancara memiliki aturan kelulusan khusus atau dikendalikan oleh satu atau beberapa peserta, aturan yang lebih ketat berlaku untuk wawancara penelitian. Tidak seperti percakapan biasa, wawancara penelitian dirancang untuk mendapatkan informasi hanya dari satu pihak, sehingga hubungan asimetris pasti muncul. Peneliti cenderung melakukan wawancara untuk menemukan perasaan, persepsi, dan pikiran partisipan.¹⁰

Dalam metode wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara persiapan yang memungkinkan responden untuk menjawab pertanyaan yang lebih umum, serta pernyataan panjang yang tidak secara langsung membahas pokok pembicaraan dan membahas masalah lain. percakapan wawancara. Untuk melakukan ini, para peneliti merekam wawancara dengan audio, tetapi masih merekam pandangan utama yang diungkapkan oleh empat orang yang diwawancarai. Selanjutnya untuk melakukan wawancara peneliti menggunakan antara lain pertanyaan langsung kepada

¹⁰ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.

responden atau wawancara online melalui media aplikasi yang terhubung dengan internet.

c. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah sumber data yang melengkapi penelitian, baik sumber tertulis, film, gambar (foto) atau karya monumental yang menginformasikan proses penelitian. Sebaliknya, kredibilitas temuan penelitian kualitatif sedikit banyak bergantung pada penggunaan dan pemanfaatan literatur yang ada.¹¹

Dalam metode perekaman ini, peneliti menggunakan kamera video sebagai bukti bahwa wawancara benar-benar terjadi, sehingga rekaman tersebut memberikan kepercayaan terhadap hasil wawancara yang diperoleh. Data material berkualitas tinggi yang disusun oleh para ahli.¹²

1.6.5. Teknik Analisis Data

Teknologi analisis data adalah proses pengolahan data menjadi informasi baru. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memudahkan dalam memahami sifat-sifat data dan membantu memecahkan masalah khususnya yang berkaitan dengan penelitian.¹³ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman untuk menganalisis data yang terkumpul di lapangan. Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011) mengusulkan agar kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilanjutkan sampai data jenuh. Tindakan yang dilakukan antara lain:

a. Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data, tahap pertama yang harus dilakukan dalam model interaktif adalah proses pengumpulan data. Dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi dan dengan menggunakan alat bantu yang berupa kamera atau tape record.

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data yang telah ditentukan sejak awal. Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti

¹¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181.

¹² Didin Fatihudin dan Lis Holisin (eds), *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2020, Cet Ke-1, h.128

¹³ <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-pengertian-hingga-contoh-penggunaan>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pada pukul 19.14 WIB.

melibatkan informan , aktivitas, latar, atau konteks terjadinya peristiwa. Sebagai “alat pengumpul data” peneliti harus pandai-pandai mengelola waktu yang dimiliki, menampilkan diri, dan bergaul terhadap subjek penelitian yaitu karyawan Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono . Pada pengumpulan data ini peneliti mengelola data yang diperoleh dengan cara data yang telah terkumpul yaitu berupa observasi, wawancara, dokumentasi atau yang berasal dari jurnal, buku, dan lain-lain.

b. Reduksi Data

Dalam proses peneliti melakukan reduksi data dengan cara data diolah dengan beberapa pertimbangan, penyaringan, dan pengklafikasian. Dalam pertimbangan dan penyaringan sangat penting untuk dilakukan. Hal tersebut agar data yang digunakan tidak terlalu banyak. Misalnya ketika peneliti melakukan observasi dengan berbagai kemungkinan pertanyaan yang muncul di benak peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan pertimbangan dan penyaringan data apakah hal tersebut atau pertanyaan tersebut pantas untuk ditanyakan kepada karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono dan apakah telah sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan dan dan menyaring refrensi-refrensi yang ada baik dalam jurnal ataupun website resmi apakah hal itu sudah relevan dengan apa yang akan diteliti. Dan selanjutnya yaitu tahap pengklafikasian dengan cara mengelompokkan data yang telah ada. dalam tahap ini peneliti menggolongkan sumber data yang telah peneliti peroleh. Sumber data yang peneliti peroleh berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu sumber data secara langsung, diamati dan dicatat, seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian ini data disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, tabel, hubungan antar kategori, flowchart, dll. Berkaitan dengan hal tersebut, Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa penelitian kualitatif paling sering menggunakan teks naratif untuk menyajikan data. Dalam penelitian ini peneliti lebih sering menggunakan penyajian data berupa teks naratif. Akan tetapi peneliti juga tetap menggunakan tabel atau flowchart sebagai penyajian data penelitian ini dengan tujuan agar lebih kredibilitas.

d. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti adalah dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Hal tersebut telah sesuai dengan tehnik analisis Miles dan Huberman (1984). Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Jadi ketika peneliti telah mengumpulkan data baik dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru, maka peneliti melakukan penarikan kesimpulan.

1.6.6. Uji Kredibilitas Data

Pada uji kredibilitas ini peneliti melakukan dengan beberapa metode diantaranya sebagai berikut:

a. Menggunakan Bahan Referensi

Untuk memastikan bahwa wawancara benar-benar dilaksanakan, maka peneliti mengajukan bukti berupa rekaman hasil wawancara beserta dengan foto bersama dengan keempat narasumber. Dengan adanya bukti hasil wawancara, maka hasil yang diperoleh dapat lebih dipercaya.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan konfirmasi terkait dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber sebelumnya. Peneliti memilih untuk memperoleh sumber data hanya dari empat informan dengan justifikasi bahwa keempat narasumber merupakan pihak yang mengetahui implementasi strategi anti-*fraud* pada BSI KCP Semarang MT Haryono. Selain itu, narasumber keempat merupakan RBC (*Regional Bussiness Control*) yang bertugas memastikan efektifitas internal control, mitigasi risiko, penerapan kepatuhan terhadap aktivitas operasional (pembiayaan dan non pembiayaan) Unit Kerja, dan investigasi. Sehingga data dapat dikatakan jenuh ketika peneliti melakukan wawancara dengan narasumber keempat. Oleh sebab itu, sumber lain yang digunakan oleh peneliti dalam tahap triangulasi sumber adalah informasi dari internet atau data sekunder seperti *annual report*. Dengan demikian, peneliti dapat mengetahui apakah keempat narasumber berbicara sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan atau tidak.

1.7. Sistematika Penulisan

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi landasan teori yakni mengkaji teori serta yang berkaitan dengan *fraud*.

c. BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

Bab ini meliputi pertama tentang gambaran umum tentang BSI KCP Semarang MT Haryono

d. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan penulisan skripsi ini yakni analisis implementasi strategi anti *fraud* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono.

e. BAB V PENUTUP

Meliputi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. *Fraud*

2.1.1. Pengertian *Fraud*

Menurut the *Association of Certified Fraud Examiners* ACFE *Fraud* adalah orang-orang dari dalam atau luar organisasi melakukan tindakan ilegal yang dilakukan dengan sengaja (seperti memanipulasi atau memberikan informasi palsu kepada pihak ketiga) untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya, yang dapat merugikan pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung¹⁴.

Definisi kecurangan atau *Fraud* dalam Tuanakotta merupakan Setiap aktivitas ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan. Tindakan tersebut tidak didasarkan pada ancaman kekerasan atau kekerasan fisik. Penipuan oleh individu dan organisasi untuk mendapatkan uang, properti atau layanan. Hindari membayar atau kehilangan layanan. atau mengamankan kepentingan bisnis pribadi. Menurut definisi di atas, dapat diringkas sebagai berikut¹⁵:

- a. *Fraud* merupakan Tindakan yang melanggar hukum.
- b. Perbuatan *Fraud* yang memiliki unsur disengaja, ada kejahatan manipulasi (*deception*), menghilangkan (*concealment*), dan menghilangkan kepercayaan (*violation of trust*).
- c. Mengambil keuntungan secara haram (*illegal advantage*)

Penipuan adalah istilah umum dan tidak mencakup semua jenis peluang yang dapat digunakan sehubungan dengan keahlian khusus yang dipilih seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas pihak lain dengan memberikan informasi palsu. Tidak ada aturan standar yang ketat yang dapat dikeluarkan sebagai pernyataan umum yang mendefinisikan penipuan, termasuk sembrono, curang atau menggunakan cara yang licik dan tidak masuk akal untuk melakukan penipuan. Satu-satunya batasan yang mendefinisikan kecurangan adalah hal-hal yang membatasi ketidakjujuran manusia¹⁶. Kecurangan (*Fraud*) merupakan Tindakan kejahatan yang memiliki unsur:

¹⁴ Zahara and Novita, "Crowe's *Fraud* Pentagon Dalam Mengindikasikan Kecurangan Laporan Keuangan."

¹⁵ Sarinah Joyce M. Rafael and I Komang Arthana, "Red Flags Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 57–72.

¹⁶ Ibid.

- a. Sebuah representasi,
- b. Ada material,
- c. Ada kesalahan,
- d. disengaja,
- e. dapat dibuktikan,
- f. Ada korban,
- g. Ada kerugian.

Menurut *Black Law Dictionary Fraud* adalah¹⁷:

1. Keadaan yang timbul dari kekeliruan yang disengaja atas fakta atau perilaku yang cenderung memengaruhi orang lain untuk bertindak atau merugikan mereka biasanya salah, tetapi dapat merupakan kejahatan dalam keadaan tertentu, terutama bila dilakukan dengan sengaja;
2. Representasi keliru yang ceroboh atau tidak diperhitungkan (*misrepresentations*) yang tidak memiliki fakta yang dapat diandalkan yang dapat memengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau membuat;
3. Kerusakan yang disebabkan oleh pengetahuan tentang pernyataan atau representasi yang salah (*misrepresentations*), penghilangan fakta-fakta penting, atau pernyataan ceroboh atau tidak diperhitungkan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak atau bertindak merugikan mereka.

Ada banyak jenis *Fraud*, yang menggambarkan seberapa luas definisi *Fraud*. Badan Pengawas Keuangan menyatakan bahwa unsur-unsur *Fraud* adalah harus ada kesalahan penyajian fakta material masa lalu atau sekarang, yang dibuat dengan sengaja atau ceroboh (*knowingly or recklessly*) dengan maksud untuk menyebabkan suatu pihak bertindak, bahwa pihak yang dirugikan harus bertindak (*acted*) melawan pernyataan yang keliru (*misrepresentation*) dan bahwa hal itu menyebabkan kerugian (*detriment*)¹⁸.

2.1.2. *Fraud* dalam Islam

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seperangkat nilai, cara hidup dan praktik. Nilai-nilai Islam memiliki nilai-nilai khusus yang mengatur dan membatasi gerak langkah manusia dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut meresapi setiap aspek kehidupan, baik politik,

¹⁷ Zahara and Novita, "Crowe's *Fraud* Pentagon Dalam Mengindikasikan Kecurangan Laporan Keuangan."

¹⁸ Komang Agus Sudarma et al., "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Pt. Bpr Nusamba Kubutambahan," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 10, no. 3 (2019): 435–446.

masyarakat, pertahanan maupun ekonomi (Sudarmono & Utami, 2021). Oleh karena itu, dalam Islam, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah 188, penipuan dilarang:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini memberi kita arti umum tentang curang, Allah SWT tidak mengizinkan umat Islam memakan kekayaan dari hasil yang tidak adil. Oleh karena itu, semua perilaku yang disebutkan dalam perilaku tersebut dianggap sebagai kecurangan. Sementara ada beberapa jenis penipuan dalam hukum Islam, termasuk tadlis atau khilaba, ghabn, ghabn fahish, penipuan, gharar, dan penipuan (taghrir), mereka digunakan secara bergantian untuk tujuan penipuan. Ada berbagai jenis kecurangan yang dapat dikaitkan dengan kesalahan organisasi, antara lain ketidakjujuran, kebohongan, pelanggaran fakta/janji, qiyana, penyuapan, gala, perburuhan.

a. Ketidakjujuran

Ketidakjujuran adalah sejenis kesalahan yang tidak jujur. Orang jujur selalu cenderung menipu orang lain. Perilaku yang salah atau curang termasuk penggelapan, penandaan, perusakan, penghapusan atau penyembunyian properti; mengubah atau memalsukan kertas atau dokumen elektronik, termasuk penghancuran kertas atau dokumen elektronik; mengklaim dan/atau memanipulasi fakta secara tidak benar; Mengandung rahasia dagang atau penggunaan kekayaan intelektual, sistem komputer, termasuk peretasan atau pembajakan perangkat lunak, suap atau sogokan, konflik kepentingan atau kewajiban.

b. Kebohongan pelanggaran fakta/ janji

Berbohong dapat diartikan sebagai pernyataan tidak benar, berbohong, atau kejujuran dan ketidakjujuran. Islam juga melarang berbohong.

c. *Khiyanah* (ketidaksetiaan)

Khiyanah dapat diturunkan sebagai pengkhianatan. Khiyanah melibatkan penipuan, pelanggaran perjanjian dan janji, kurangnya kepercayaan, dan lain-lain. Khiyanah tidak bermoral. Ini bisa berbentuk keuangan atau pelanggaran kepercayaan. Ini tentang kehormatan, kekuasaan atau status.

d. *Al-rishwah* (suap)

Suap adalah segala bentuk penawaran atau janji yang dibuat untuk mempengaruhi atau membujuk seseorang untuk terlibat dalam tindakan ilegal yang menguntungkan si pemberi. Hal ini juga dapat didokumentasikan sebagai pemberian insentif secara tidak sah kepada mereka yang berkuasa untuk memengaruhi rasa keadilan, proses hukum, dan keahlian. Suap sangat dikutuk dalam Islam karena cenderung mendorong perilaku tidak jujur (Februari 2019). Dalam konteks akademisi, pemberian hadiah kepada orang yang memegang jabatan publik atau posisi otoritas tidak dapat diterima karena dapat menjadi bagian dari suap, seperti yang dikatakan Khalifah Umar (RA) kepada semua gubernurnya:

“Waspadalah terhadap hadiah karena mereka merupakan bagian dari suap”

e. *Al-gharar* (ketidakpastian, risiko, spekulasi)

Jual beli gharar dalam terminologi Islam adalah jual beli barang atau jasa yang belum tersedia, atau karena alasan yang tidak diketahui, atau beresiko atau rugi, tetapi tidak mengetahui apa yang diperjualbelikan. Jenis penjualan ini dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan perselisihan dan ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hukum syariah juga melarang kontrak yang menuntut ganti rugi.

f. *Ikhikar* (Penimbunan)

Secara harfiah, itu berarti menimbun akumulasi persediaan tersembunyi untuk digunakan di masa mendatang. Secara teknis, penimbunan berarti membeli barang dalam jumlah besar untuk menaikkan harga. Investor yang ingin meningkatkan harga suatu komoditas dapat melakukannya dengan memanfaatkan permintaan tersebut dan membeli saham fisik dan kontrak berjangka pada komoditas tersebut. Operasi rahasia terhadap komoditas ini ditujukan untuk memanipulasi harga, yang sangat dilarang dalam Islam.

Dalam teori ulama besar muslim yakni Ibnu Khaldun (1332-1406 M) tentang peradaban sebagai berikut:

1. Kekuatan kedaulatan tidak terwujud kecuali melalui penerapan *Syariah*
2. *Syariah* tidak dapat diterapkan kecuali oleh penguasa
3. Kedaulatan tidak bisa didapatkan kecuali melalui rakyat
4. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali melalui pembangunan

5. Rakyat tidak dapat dipertahankan kecuali oleh kekayaan
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui ditegakkannya keadilan
7. Keadilan diciptakan oleh Allah SWT yang bisa digunakan untuk mengevaluasi manusia
8. Pemerintah berdaulat dengan tanggung jawab untuk mengaktualisasikan keadilan.

Dari delapan prinsip diatas bisa dikaitkan dengan variabel social economy dan politik termasuk *sovereign/political authority* yaitu *government* (G), kepercayaan dan peraturan *Syariah* (S), rakyat/Nation (N), *wealth* (W), pembangunan (G), dan keadilan (J). kaitan antara penjelasan diatas memiliki arti yaitu ekonomi sosial dan politik jika berlandaskan kepada pemahaman *Syariah* dan keadilan maka akan semakin baik pertumbuhan kekayaan dari warga maupun suatu bangsa.

Bila dikaitkan dengan *fraud*, jika pemerintah menjalankan peraturan *Syariah* dengan baik maka keinginan untuk memberantas tindakan *fraud* akan tinggi karena orang yang melakukan tindakan *fraud* bisa mempengaruhi pertumbuhan dan kekayaan rakyat maupun negara itu sendiri. Jika semakin sedikit tindakan *fraud* maka orang maupun negara pasti meningkat pertumbuhan, kekayaan, dan tingkat keadilannya

2.1.3. Perkembangan *Fraud* di Indonesia

Tentunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai organisasi yang bertugas mengawasi dan mengatur industri perbankan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Undang-Undang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah wali masyarakat yang dipercayakan untuk mengatur dan mengelola keuangan negara, dan karenanya wajib melindungi dana nasabah dari risiko penipuan keuangan. Mulai dari kejahatan yang berkaitan dengan perizinan industri perbankan, kejahatan yang berkaitan dengan rahasia bank, kejahatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengawasan bank, yang berkaitan dengan bisnis bank, dan kejahatan perbankan yang paling ekstrim adalah perampokan bank¹⁹.

Kegagalan menjaga kepercayaan perbankan dapat berdampak sistemik dan mengganggu stabilitas keuangan negara. OJK secara berkala (triwulanan) membuat laporan mengenai pemeriksaan umum dan khusus bank sebagai bagian dari tanggung jawabnya untuk mengurangi risiko kecurangan perbankan. Terdapat 57 bank yang terindikasi *fraud* pada tahun 2017. Berbeda dengan tahun 2018, sebanyak 36 bank melaporkan *fraud* hingga kuartal III. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih banyak bank yang terlibat dan menderita akibat kejahatan perbankan.

¹⁹ Triwahyuni Triwahyuni and Anton Prasetyo, "Pencegahan *Fraud* Pada Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)Tbk Kantor Cabang Gombong: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi," *Accounting and Management Journal* 5, no. 2 (2021): 44–55.

Sayangnya, OJK tidak menjelaskan penyebab, pertahanan, jenis, dan tanda-tanda peringatan penipuan di perbankan dalam laporan ini.

Tindak pidana perbankan sebagian besar dilakukan terhadap bank umum konvensional (BUK), terutama dalam kasus *Asset Misappropriation* (MA), baik tunai maupun non tunai. Kebijakan penggunaan Giro misalnya, tidak diatur secara jelas, sehingga pegawai dapat dengan mudah menggunakannya secara tidak bertanggung jawab, seperti yang terjadi pada pegawai bank yang menggunakan Giro bank untuk diberikan kepada konsumen. Hal ini terlihat sejak kejadian tersebut, karena Bank Indonesia baru-baru ini menambahkan kebijakan baru terkait *Bilyet Giro*. Selain itu, masih ada SOP perbankan yang memperbolehkan penggunaan plastik hanya dengan disertai pengamanan saat kantong uang habis dalam SOP pengisian di ATM. Kebijakan ini tentu saja semakin mendorong kejahatan perbankan.

Hal yang seperti itu merupakan pengawasan yang buruk terhadap pelaporan keuangan adalah penyebabnya. Kurangnya pengalaman pengawasan, minat terhadap laporan keuangan, dan pengetahuan tentang prosedur penilaian semuanya dapat menyebabkan lemahnya pengawasan. Diperlukan sistem dan alat untuk mendeteksi kejahatan perbankan, dan juga harus dilakukan review secara berulang laporan keuangan secara berkala. Selain itu, ada kejahatan perbankan online, salah satunya melibatkan penggunaan skimmer untuk mengumpulkan ID pengguna dan kata sandi dari pelanggan. Untuk mengamankan data nasabah dari kejahatan keuangan, bank harus mengembangkan alat deteksi penipuan.

2.1.4. *Klasifikasi Fraud*

ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) membagi *Fraud* (kecurangan) dalam tiga jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan, yaitu²⁰:

a. *Asset Misappropriation*

Kategori ini melibatkan penyalahgunaan atau pencurian milik perusahaan atau milik orang lain. Karena sifatnya yang nyata atau kemampuannya untuk diukur atau dihitung, jenis *Fraud* ini adalah yang paling sederhana untuk diidentifikasi (*defined value*).

²⁰ Gading Ruchiatna, Pratana Puspa Midiastuty, and Eddy Suranta, "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*," *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 1, no. 4 (2020): 255–264.

b. *Fraudulent Statements*

Mencakup langkah-langkah yang dilakukan oleh eksekutif atau pejabat suatu bisnis atau organisasi pemerintah untuk menyembunyikan keadaan keuangan mereka yang sebenarnya dengan menggunakan rekayasa keuangan untuk menampilkan laporan keuangan mereka dengan cara yang memaksimalkan keuntungan.

c. *Corruption*

Tindakan ini sering terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan tata pemerintahan yang baik masih belum dikenal, membuat komponen integritas masih bisa diperdebatkan. Karena orang-orang yang terlibat dalam kerjasama mendapatkan imbalan, *Fraud* semacam ini sering tidak terdeteksi (simbiosis mutualisme). Ini termasuk perlindungan/konflik kepentingan, penyuapan, gratifikasi tidak sah/ilegal dan pemerasan ekonomi.

Dari berbagai definisi *fraud* di atas, *fraud* dapat diartikan sebagai segala bentuk penipuan yang bias, termasuk kebohongan, pencurian, rekayasa, dan penggelapan (perubahan aset perusahaan yang tidak semestinya untuk kepentingan pribadi). *Fraud* sendiri merupakan perbuatan melawan hukum di mana para pemangku kepentingan di dalam dan di luar organisasi secara langsung merugikan kepentingan pihak lain demi mencari kepentingan pribadi atau kelompok.

2.1.5. Pelaku *Fraud*

Berdasarkan *Report to the Nations ACFE 2019*²¹, pemilik dan pemimpin perusahaan hanya terlibat 23,3% dalam tindakan *fraud*. Namun, ketika pemilik dan pemimpin terlibat dalam tindakan *fraud*, penipuan yang dilakukan dapat mencapai angka \$834.000. Manajer dinyatakan sebagai pelaku yang paling sering terlibat dalam tindakan *fraud*, dengan presentase sebesar 37,1% dan kerugian mencapai \$150.000. Sedangkan karyawan terlibat dalam tindakan *fraud* suatu perusahaan dengan presentase 39,7% dan perkiraan kerugian sebesar \$70.000. Beberapa penelitian telah dilakukan dalam menganalisa pelaku tindakan *fraud* berdasarkan gender. Meskipun laki-laki cenderung lebih sering melakukan tindakan *fraud*, hasil penelitian menunjukkan bahwa 40,9% kasus *fraud* dilakukan oleh seorang wanita. Hal yang ditekankan

²¹ <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pada pukul 23.33 WIB.

dalam penjelasan diatas adalah *fraudster* dapat ditemukan dari berbagai kalangan, tanpa melihat usia, jenis kelamin, maupun jabatan yang dimiliki seorang *fraudster*. Namun demikian, kerugian yang dialami korban bertambah seiring bertambahnya usia dan tingkat pendidikan *fraudster* serta jumlah pelaku yang terlibat dalam *fraud*. Pada umumnya, ketika melancarkan aksinya *fraudster* tidak melibatkan pihak lain atau hanya dilakukan seorang diri. Namun, ketika *fraud* melibatkan pihak lain atau dilakukan lebih dari satu orang, maka kerugian yang diakibatkan akan cenderung lebih besar yaitu mencapai empat kali lebih besar dibandingkan kerugian yang ditimbulkan *fraud* pada umumnya. Ketika *fraud* terjadi, reaksi “*penyangkalan*” merupakan reaksi yang pada umumnya dilakukan oleh *fraudster*. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik *fraudster* karena mereka tampak seperti orang-orang yang memiliki karakteristik yang dicari atau didambakan organisasi dalam memperkerjakan pegawai.

2.1.6. Tanda-Tanda perilaku *Fraud*

Berdasarkan *Report The Nations ACFE 2019*, Tanda-tanda perilaku *fraud* dapat dilihat pada gambar berikut:²²

Gambar 2.1.
Report The Nations ACFE 2019

Tanda-tanda pelaku <i>Fraud</i>	Persentase
Perilaku bermewah-mewahan	34.7%
Kesulitan keuangan	15.9%
Mempunyai hubungan akrab dengan pembeli dan pemasok	13.4%
Sikap dan perilaku yang “lihai”	6.7%
Tidak suka membagi tugas dengan sesama karyawan	4.6%
Tekanan berlebihan dari dalam perusahaan dan organisasi	4.6%
Tekanan dari keluarga agar tampak sukses	4.2%
Tidak puas dengan gaji yang rendah	3.8%
Selalu menolak untuk mengambil cuti	2.9%
Ketidakstabilan di lingkungan kehidupannya	2.9%
Complain tidak diberi wewenang atau otoritas	2.5%
Permasalahan terkait dengan pekerjaan masa lalu	2.1%
Permasalahan (pisah) keluarga	0.4%
Cepat marah, sikap curiga serta bertahan	0.4%
Diisolasi oleh masyarakat	0.4%
Permasalahan hukum di masa lalu	0.4%
Masalah ketergantungan pada obat atau narkoba	0%

Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Penipuan yang berlebihan menyumbang 34,7%, dan kesulitan keuangan menyumbang 15,9%. Data tersebut juga menunjukkan bahwa 13,4% responden memiliki hubungan dekat dengan pembeli dan pemasok, dan 6,7% responden memiliki sikap dan perilaku “cerdas”. Mereka juga mengatakan bahwa mereka enggan berbagi

²² <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pada pukul 13.24.

tugas dengan rekan kerja (4,6%) dan terlalu banyak menekan mereka dari perusahaan atau organisasi mereka (4,6%). Data survei juga menunjukkan bahwa 4,2% keluarga merasakan tekanan untuk berhasil, dan 3,8% keluarga berpenghasilan rendah merasa tidak puas. Sebaliknya, 2,9% selalu menolak untuk pamit, dan 2,9% mengatakan lingkungan tidak stabil. Keluhan ditolak atau disetujui sebesar 2,5 persen, dibandingkan dengan 2,1 persen untuk masalah di pekerjaan sebelumnya. Masalah keluarga (perpisahan) 0,4%, kegembiraan, keraguan, kelangsungan hidup 0,4%. Survei menemukan 0,4% tidak memiliki hubungan dengan masyarakat, 0,4% karena masalah hukum sebelumnya dan 0% karena masalah narkoba atau kecanduan.

2.1.7. *Fraud Triangle*

Teori *Fraud triangle* merupakan suatu gagasan yang meneliti tentang penyebab terjadinya kecurangan. Gagasan ini pertama kali diciptakan oleh Cressey (1953) dinamakan *fraud triangle* atau segitiga kecurangan. *Fraud triangle* menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud* yaitu antara lain sebagai berikut :

2.1.7.1. *Pressure* (Tekanan) Stres dapat menyebabkan seseorang berselingkuh. Stres bisa datang dalam berbagai bentuk, termasuk gaya hidup, tuntutan keuangan, dan banyak lagi. Sebagian besar tekanan berasal dari tekanan permintaan ekonomi. Kebutuhan ini seringkali dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat dibagi dengan orang lain, sehingga perlu ditangani secara gelap, yang pada akhirnya mengarah pada perselingkuhan.

Menurut SAS No. 99, ada empat situasi yang biasanya terjadi di bawah tekanan dan dapat menimbulkan kecurangan, yaitu:

2.1.7.1.1. *Financial stability* adalah keadaan yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi stabil. Contohnya adalah perusahaan mungkin memanipulasi laba ketika stabilitas keuangan atau profitabilitasnya terancam oleh kondisi ekonomi.

2.1.7.1.2. *External pressure* merupakan tekanan yang tidak semestinya pada manajemen untuk memenuhi kebutuhan atau harapan pihak ketiga. Contohnya adalah ketika perusahaan menghadapi tren pada tingkat ekspektasi analis investasi, ada tekanan besar pada perusahaan atau pihak eksternal lainnya untuk memberikan kinerja terbaik bagi investor dan kreditur.

2.1.7.1.3. *Personal financial need* merupakan Keadaan dimana kondisi keuangan perusahaan

juga dipengaruhi oleh kondisi keuangan para eksekutif perusahaan. Contohnya adalah investasi keuangan manajemen yang signifikan di perusahaan di mana sebagian besar kompensasi manajemen bergantung pada pencapaian harga saham yang agresif, laba operasi, kesehatan keuangan, atau target arus kas. Manajemen menjaminkan aset pribadi terhadap hutang perusahaan.

2.1.7.1.4. *Financial targets* merupakan tekanan yang tidak semestinya pada manajemen untuk mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan oleh dewan direksi atau manajemen. Contohnya adalah bahwa perusahaan dapat memanipulasi pendapatan agar sesuai dengan perkiraan atau tolok ukur yang diberikan oleh analis, seperti B. laba tahun sebelumnya.

2.1.7.2. *Opportunity* (Peluang)

Membiarkan kecurangan adalah mungkin. Risiko timbul dari kelemahan dalam pengendalian internal, pengawasan manajemen yang tidak memadai atau penyalahgunaan wewenang. Peluang dapat muncul kapan saja dan membutuhkan pemantauan dari atas ke bawah melalui struktur organisasi. Sebagaimana dinyatakan dalam SAS #99, perusahaan harus memiliki proses, prosedur, dan kontrol yang berguna dan mempekerjakan orang di posisi tertentu untuk mencegah mereka melakukan penipuan dan mendeteksinya secara efektif. SAS No. 99 menyatakan bahwa peluang terjadinya kecurangan akuntansi dapat muncul dalam tiga kategori kondisi, antara lain sebagai berikut:

2.1.7.2.1. *Nature of industry* merupakan Mengacu pada risiko yang dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi di industri yang membutuhkan penilaian dan pertimbangan yang lebih besar. Contohnya adalah penilaian persediaan, yang menimbulkan risiko salah saji yang lebih besar bagi perusahaan dengan persediaan yang tersebar di banyak lokasi. Risiko informasi inventaris yang salah ini meningkat saat inventaris kedaluwarsa.

2.1.7.2.2. *Ineffective monitoring* merupakan Perusahaan tidak memiliki mekanisme pengawasan yang efektif untuk memantau kinerja perusahaan. Contohnya termasuk dominasi manajemen oleh satu atau sekelompok kecil individu, kurangnya manajemen kompensasi yang tepat, dan pengawasan yang tidak memadai atas pelaporan keuangan dan proses pengendalian internal oleh dewan dan komite audit.

2.1.7.2.3. *Organizational Structure* adalah Struktur organisasinya kompleks dan tidak stabil. Contohnya adalah struktur organisasi yang terlalu kompleks, kepergian orang-orang seperti manajemen senior atau eksekutif perusahaan.

2.1.7.3. *Rationalization* (Rasionalisasi)

Rasionalisasi membuat penipu mencari pembenaran atas tindakan mereka. Rasionalisasi adalah bagian paling sulit dari segitiga penipuan untuk diukur. Contohnya adalah ketika CEO atau manajemen lainnya acuh tak acuh terhadap proses pelaporan keuangan. Terus membuat prakiraan yang terlalu optimis, meningkatkan kemungkinan kesalahan pelaporan keuangan.²³

Menurut SAS No. 99, tingkat rasionalisasi perusahaan dapat diukur dengan siklus pendapatan auditor, laporan audit yang diperoleh perusahaan, dan jumlah total cadangan dibagi total aset. Earnings Management Schipper mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi proses akuntansi eksternal untuk pengayaan pribadi. Pernyataan ini konsisten dengan Healy dan Wahlen, yang menyatakan bahwa manajemen berbasis hasil terjadi ketika manajer membuat keputusan pelaporan keuangan dan memanipulasi transaksi untuk mengubah pelaporan keuangan, baik untuk menyedatkan beberapa pemangku kepentingan tentang kinerja perusahaan, atau untuk mempengaruhi pemenuhan kontrak yang bergantung pada data.²⁴

2.1.8. Pendekatan *Fraud*

2.1.8.1. *Whistleblowing system*

Whistleblowing system adalah komponen dari sistem pengendalian internal yang berfungsi untuk menghentikan perilaku tidak teratur dan kecurangan serta membuat prosedur tata kelola yang baik menjadi lebih efektif²⁵. Pendekatan ini berupaya mengungkap penipuan atau kesalahan lain yang dapat membahayakan organisasi dan menghentikannya menjadi lebih buruk dari yang sudah ada²⁶. Selain itu sistem *whistleblowing* dapat digunakan untuk mendukung penegakan etika perusahaan, mempromosikan perilaku etis di kalangan karyawan, atau sebagai cara untuk menghentikan perilaku tidak jujur atau curang yang merugikan bisnis. Alhasil, mendorong terciptanya sistem *whistleblowing* yang sukses di setiap bisnis, baik di sektor swasta maupun publik.

²³ Skousen, C., Kevin R., dan Charlotte J. 2008. *Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle And Sas No. 99*.

Diakses: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1295494.

²⁴ Norbarani, Listiana. 2012. Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Analisis *Fraud Triangle* Yang Diadopsi Dalam Sas No.99. Diakses: http://eprints.undip.ac.id/35524/1/Skripsi_32.pdf

²⁵ Agus Sudarma et al., "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Pt. Bpr Nusamba Kubutambahan."

²⁶ Nurul Hutami Ningsih, Mella Handayani, and Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, "Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdapat Di Kota Palembang)," *Jurnal Akuntanika* 8, no. 1 (2022): 79–87.

Seseorang yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan yang berindikasi adanya pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat menggunakan *whistleblowing system* di sektor publik yang merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Pedoman *whistleblowing system* Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2008 memberikan penjelasan tentang *whistleblowing system* sektor swasta. Teori di atas dapat digunakan untuk menarik kesimpulan bahwa sistem *whistleblowing system* adalah suatu mekanisme atau sistem pelaporan pelanggaran yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memerangi praktik-praktik yang bertentangan dengan tujuan organisasi²⁷. Oleh karena itu, sangat penting bagi entitas atau organisasi untuk menerapkan sistem *whistleblowing* guna mencapai tata kelola perusahaan yang baik.

2.1.8.2. *Redflags*

Istilah *red flags* atau Dalam berbagai literatur audit, bendera merah sering digunakan untuk menunjukkan bahaya atau ada sesuatu yang tidak pada tempatnya dan perlu ditangani²⁸. Selain itu auditor dan penyidik mencari bendera merah yang bisa menjadi tanda kecurangan laporan keuangan. *Red flags* juga dapat digambarkan sebagai suatu kondisi yang tidak biasa atau berbeda dari norma. Dengan kata lain, red flag merupakan indikator atau indikasi adanya anomali yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Bendera merah tidak serta merta menunjukkan apakah seseorang bersalah atau tidak, melainkan tanda peringatan bahwa penipuan telah atau telah terjadi. Bendera merah dikatakan penting, seperti dalam SAS 99 - Pertimbangan Kecurangan dalam Audit Laporan Keuangan, yang menyatakan bahwa auditor perlu menilai secara khusus risiko salah saji akibat kecurangan. SAS 99 juga memberikan panduan kepada auditor tentang proses verifikasi saat menilai kecurangan. DiNapoli mengatakan jika ada tanda bahaya, seseorang perlu mengambil tindakan untuk menyelidiki situasi tersebut dan menentukan apakah memang benar terjadi penipuan²⁹. Memang benar jika ada tanda kecurangan, langkah-langkah harus diambil untuk melihat apakah kecurangan benar-benar terjadi, namun terkadang salah saji dalam laporan, perubahan perilaku karyawan, volume penjualan yang meningkat tajam dan tidak selalu menandakan kecurangan. Untuk alasan ini, akuntan publik dan auditor harus dapat membedakan antara keduanya

²⁷ Nurul Hutami Ningsih, Mella Handayani, and Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, "Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdapat Di Kota Palembang)," *Jurnal Akuntanika* 8, no. 1 (2022): 79–87.

²⁸ Rafael and Arthana, "Red Flags Pengelolaan Dana Desa."

²⁹ Syamsuri Rahim, Muslim Muslim, Asbi Amin, "Red Flag And Auditor Experience Toward Criminal Detection Trough Profesional Skepticism," *Jurnal Akuntansi* 23, no. 1 (2019): 46.

dan perlu diingat bahwa tanggung jawab individu yang dapat dipercaya dan akuntabel untuk melakukan investigasi lanjutan untuk bendera merah³⁰. Agar akuntan publik dan auditor dapat mengenali *red flags* dengan baik maka mereka perlu mengetahui kategori *red flags*. *Red flags* dikategorikan menjadi tiga terdiri atas³¹:

2.1.8.2.1. Kesempatan atau (*opportunities*)

2.1.8.2.2. Tekanan atau (*pressures/incentives*)

2.1.8.2.3. Perilaku (*attitudes*) atau rasionalisasi (*rationalization*).

Tiga kategori *red flags* ini telah dijelaskan pada bagian mengenai teori segitiga kecurangan, dimana *red flags* memang diciptakan dengan berdasarkan konsep teori segitiga kecurangan.

2.2. Strategi Anti *Fraud*

Mengingat kendala biaya dan aset penipuan di tempat kerja, mencegah penipuan perusahaan harus menjadi elemen kunci dari organisasi strategis. Ini karena sebagian besar penipuan tidak terdeteksi karena keterlibatan manajemen puncak dan aktor yang sangat terampil. Akibatnya, melembagakan pencegahan *Fraud* dalam bisnis membantu mengurangi biaya *Fraud* di sana. Dengan tidak adanya prosedur tersebut, ACFE mengusulkan delapan strategi pencegahan *Fraud* terkait dengan tuduhan *Fraud*. Kontrol internal, pemeriksaan latar belakang karyawan, pelatihan dan pemantauan di tempat kerja, saluran pelaporan anonim (seperti hotline dan whistleblower), audit dan peraturan *Fraud* reguler, dan kesiapan untuk menuntut pelanggaran ACFE adalah beberapa di antaranya.

Melalui peran pemantauan dewan dan komite audit, manajemen secara tradisional bertanggung jawab untuk pencegahan *Fraud*. Selain itu, salah satu metode yang digunakan oleh bisnis untuk menghindari *Fraud* telah diperiksa fungsi auditor internal dan eksternal. Dalam upaya menghentikan kasus *Fraud* di sektor perbankan yang dapat merugikan nasabah, Bank Indonesia (BI) menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* bagi bank umum³².

³⁰ Muzdalifah Muzdalifah and Nur Syamsu, "Red Flags, Task Spesific Knowledge Dan Beban Kerja Pada Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*," *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 6, no. 2 (2020): 92–101.

³¹ Asbi Amin, "Red Flag And Auditor Experience Toward Criminal Detection Trough Profesional Skepticism."

³² Agus Sudarma et al., "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Pt. Bpr Nusamba Kubutambahan." *IMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* no, 10 (2019): 435-446

Diharapkan Surat Edaran ini akan memotivasi bank umum untuk memerangi *Fraud*. Peraturan ini dimaksudkan untuk lebih mengimplementasikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Penyempurnaan Sistem Pengendalian Intern Bank. Peraturan tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi bank dalam memerangi *fraud* tidak hanya melalui upaya pencegahan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi anti *fraud* yang komprehensif, sebagai upaya untuk mendeteksi, memeriksa, dan meningkatkan sistem pengendalian intern³³. Pada tanggal 9 Desember 2011, bank sentral Indonesia mengeluarkan "Pemberitahuan Penerapan Strategi Anti-*Fraud*", yang dengan jelas dan jelas menetapkan langkah-langkah apa yang harus diambil bank umum Indonesia pada tanggal 9 Desember 2011 untuk mencegah penipuan. Karena strategi anti *fraud* memiliki empat pilar yang saling berkaitan yaitu pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

2.2.1. Pencegahan

2.2.1.1. Kesadaran Anti *Fraud*

Anti-Fraud awareness merupakan inisiatif untuk mengedukasi seluruh jajaran organisasi dan pihak lain yang terkait dengan bank tentang nilai pencegahan *Fraud*. Kepemimpinan yang kuat dan tingkat kesadaran penipuan yang tinggi dapat meningkatkan kesadaran penipuan. Upaya kesadaran anti *fraud* harus dilakukan sebagai berikut, antara lain sebagai berikut³⁴ :

2.2.1.1.1. Penyusunan dan Sosialisasi Anti *Fraud* Statement

Hubungan dengan pihak-pihak di dalam dan di dalam bank Komitmen tidak mentolerir penipuan pada semua pihak misalnya konsekuensi.

2.2.1.1.2. Program Budaya Anti *Fraud* Bagi Karyawan

Bank dapat menyelenggarakan sesi pelatihan, seminar, diskusi meja bundar, dan acara lainnya untuk meningkatkan kesadaran akan kebijakan anti-*Fraud*, metode *Fraud*, temuan investigasi, dan investigasi *Fraud* yang sedang berlangsung.

2.2.1.1.3. Program Kepedulian dan Kewaspadaan terhadap *Fraud* bagi konsumen

³³ Ratu Syiddah Ayu Az-Zahra, Achmad Jaelani, and Mulyadi Nursi, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta," *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no. 2 (2021): 38–44.

³⁴ Natasia Novita, "Analisis Strategi Anti-*Fraud* Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Graha Pangeran Wilayah Surabaya," *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, no. 2 (2019): 22–26.

Pembuatan brosur anti *fraud*, banner, poster, tactile map dan term/statement tertulis merupakan bagian dari upaya bank untuk meningkatkan awareness dan kewaspadaan nasabah terhadap tindakan anti *fraud*.

2.2.1.2. Identifikasi Kerawanan

Tahap manajemen risiko mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi potensi risiko penipuan, yang dapat dilakukan secara berkala. Beberapa faktor internal bank antara lain dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud*³⁵:

- 2.2.1.2.1. Kurangnya pendidikan, pengalaman, dan keahlian dalam menangani dan mencegah *Fraud*.
- 2.2.1.2.2. Sebuah masyarakat yang mendorong pengambilan risiko yang berlebihan.
- 2.2.1.2.3. Ada kebijakan dan proses yang tidak jelas, antara lain, dalam hal membayar hiburan dan memberikan hadiah kepada badan amal dan organisasi politik.
- 2.2.1.2.4. Manajemen uang yang buruk.
- 2.2.1.2.5. Kurangnya panduan manajemen senior dalam menangani dan mencegah *Fraud*.

2.2.1.3. Kebijakan Mengenal Karyawan (*Know Your Employee*)

Kebijakan mengenal karyawan secara efektif yang dimiliki bank paling sedikit mencakup³⁶:

- 2.2.1.3.1. Proses dan prosedur perekrutan/perekrutan yang efektif yang dapat memberikan gambaran menyeluruh dan akurat tentang riwayat kerja calon karyawan.
- 2.2.1.3.2. Proses seleksi yang dikembangkan secara objektif dan transparan, dengan kualifikasi yang sesuai dengan mempertimbangkan risiko. Promosi dan mutasi harus ditangani melalui sistem, termasuk penempatan pada pekerjaan dengan risiko *Fraud* yang tinggi.
- 2.2.1.4. Mengembangkan Budaya Zero Tolerance pada *Fraud*

Sesuai dengan kebijakan anti *fraud* PT Bank Syariah Indonesia, untuk meraih kepercayaan publik dan nasabah diperlukan komitmen terhadap kejujuran, kepercayaan, dan integritas. Selain prosedur pengendalian intern, peraturan perusahaan, kode etik, dan penerapan Pakta Integritas di seluruh unit kerja di lingkungan Bank Syariah Indonesia, perusahaan memiliki komitmen yang kuat untuk memerangi korupsi. Dengan mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau *fraud*, Bank

³⁵ Ayu Az-Zahra, Jaelani, and Nursi, "Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta."

³⁶ Agus Sudarma et al., "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Pt. Bpr Nusamba Kubutambahan."

Syariah Indonesia menciptakan budaya anti *fraud* antara lain sebagai berikut : ³⁷.

- 2.2.1.4.1. Cegah jangan sampai terjadi *fraud* di lingkungan Bank (*Zero Tolerance for Fraud*).
- 2.2.1.4.2. Deteksi untuk menemukan kejadian *fraud* yang mungkin ada di dalam Bank.
- 2.2.1.4.3. Mengambil tindakan cepat terhadap penipu untuk menjaga kelancaran operasional bank.
- 2.2.1.4.4. Perhatikan konsistensi dan dedikasi dalam investigasi insiden penipuan.

2.2.1.5. Pengamanan Dengan Teknologi

Pengendalian internal berbasis teknologi informasi (IT) telah diadopsi dan diimplementasikan oleh banyak organisasi di seluruh dunia, terutama yang terintegrasi dengan baik. Tidak diragukan lagi bahwa perkembangan teknologi informasi telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong evolusi pengendalian internal menuju pengendalian yang ketat, dan aman. Seiring kemajuan teknologi informasi, akan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal dengan menutup celah kecurangan³⁸.

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendefinisikan penipuan sebagai eksploitasi pekerjaan/posisi untuk pengayaan melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi. Sebuah survei oleh Pickett (2003) terhadap 10.000 organisasi di lebih dari 15 industri mengungkapkan beberapa fakta yang membuka mata bagi pelaku bisnis, yaitu bahwa 82% Komitmen oleh manajer, 40% peserta Mereka yang percaya organisasinya rentan terhadap penipuan mengatakan organisasinya memiliki kelemahan kebijakan khusus, sementara organisasi yang tidak melakukan penilaian kerentanan penipuan menemukan bahwa mereka menderita dalam 12 bulan terakhir karena curang. (Pickett, 2003: 425)

Penipuan terjadi "ketika terjadi kesalahan" dan terkait erat dengan buruknya fungsi sistem pengendalian internal perusahaan. Survei menemukan bahwa penipuan paling sering dilakukan oleh manajemen, yang membuat putus asa ketika diselidiki dan diminta untuk mengatasinya. Sehingga perusahaan mendelegasikan pekerjaannya kepada entitas yang lebih independen, Internal Audit, untuk menutupi kecurangan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa alasan utama untuk memprediksi kecurangan atau kecurangan akuntansi adalah perbaikan sistem pengendalian intern³⁹. Pembagian

³⁷ PT Bank Syariah Indonesia, "Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank Syariah Indonesia Tbk" (2019): 1–6.

³⁸ Debi Novalia, Hidayatul Kahfi, and Rika Lidya, "PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada PT Bangkit Berkah)," *Jurnal Buana Akuntansi* 6, no. 1 (2021): 57–66.

³⁹ Amararenggana Dharmesti Ali Djamhuri, "Peran Teknologi Informasi Dalam Mengantisipasi Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT XYZ Tbk)."

tanggung jawab departemen teknologi informasi masih menjadi fokus membangun sistem pengendalian internal yang baik. Dikatakan penting karena memisahkan tanggung jawab dan wewenang dengan menghadirkan bagian untuk "Desktop Development, Web Development, Production Maintenance, Non-Production Maintenance, Network and Device Maintenance, Server and Policy Maintenance, and IT Documentation." Departemen fungsional ini menjalankan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Namun, setiap peran tidak menentukan tanggung jawab dan spesifikasi khusus untuk setiap peran. Fungsi ini merupakan level terendah atau supervisor. Dalam praktiknya, departemen TI mengadakan briefing singkat setiap hari untuk membahas pekerjaan yang akan datang⁴⁰.

Auditor internal menyadari bahwa struktur organisasi TI dan desentralisasi TI memang membutuhkan perbaikan dan pengembangan yang signifikan. Oleh karena itu, meskipun masing-masing departemen fungsional telah melakukan bagiannya. Oleh karena itu, perusahaan menguji apakah sistem yang dirancang akan bekerja sesuai dengan cetak biru TI. Pengujian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut⁴¹:

- 2.2.1.5.1. Lakukan pengujian untuk menentukan apakah sistem yang dirancang konsisten dengan sistem lain yang sudah beroperasi.
- 2.2.1.5.2. Melakukan pengujian untuk menentukan apakah sistem yang baru dibangun dapat diintegrasikan dengan sistem lain atau sistem yang sudah ada.
- 2.2.1.5.3. Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem baru memiliki pemrosesan yang cepat dan apakah pengiriman data dari satu sistem ke sistem lainnya cepat.

2.2.1.6. Manajemen Sumber Daya Manusia

Ilmu atau metode untuk mengelola hubungan dan peran sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu dengan cara yang efisien, efektif, dan paling cocok untuk mencapai tujuan dengan bisnis, karyawan, dan masyarakat. maksimum. Landasan HRM (*Human Resource Management*) adalah gagasan bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan hanya sumber daya bagi perusahaan. Manajemen sumber daya manusia (SDM) adalah teknik atau prosedur yang digunakan untuk mengelola dan mendayagunakan personel sekolah/madrasah atau

⁴⁰ Debi Novalia, Hidayatul Kahfi, and Rika Lidya, "PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGANALISIS KECEKAPAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada PT Bangkit Berkah)."

⁴¹ Amararenggana Dharmesti Ali Djamhuri, "Peran Teknologi Informasi Dalam Menganalisis Kecakapan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT XYZ Tbk)."

lembaga (SDM) secara efektif dan efisien, termasuk staf pengajar dan staf administrasi⁴².

Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi produktif tenaga kerja atau orang untuk bisnis atau organisasi dengan cara yang strategis, moral, dan bertanggung jawab secara sosial. Dengan mencapai tujuan mereka, manajer dan departemen sumber daya manusia mencapai tujuan mereka. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia (MSDM) menurut Soekidjo Notoatmodjo adalah untuk meningkatkan kontribusi sumber daya manusia (pegawai) terhadap organisasi guna meningkatkan produktivitas organisasi yang bersangkutan. Jelas bahwa tim manajemen organisasi bertanggung jawab untuk mengawasi semua kegiatan organisasi yang ditujukan untuk mencapai misi dan tujuannya⁴³.

Oleh karena itu, sumber daya tersebut harus dikelola agar efektif dan efisien dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Sasaran manajemen sumber daya manusia harus menyeimbangkan tantangan organisasi, fungsi sumber daya manusia, dan orang-orang yang akan mereka pengaruhi selain mencerminkan niat manajemen senior. Kegagalan dalam menyelesaikan tugas dapat merugikan kinerja, produktivitas, keuntungan, dan bahkan kelangsungan hidup organisasi atau perusahaan

2.2.2. Deteksi

Berisi alat untuk mengidentifikasi dan mendeteksi kecurangan dalam aktivitas bisnis perusahaan, termasuk kebijakan dan mekanisme whistleblowing, audit mendadak, dan sistem pemantauan. Berbagai mekanisme pelaporan, verifikasi tanpa pemberitahuan dan sistem pemantauan dijelaskan di bawah ini⁴⁴:

2.2.2.1. Kebijakan dan Mekanisme *Whistleblowing*

Untuk memotivasi dan menginformasikan pegawai dan pejabat bank untuk melaporkan kecurangan, kebijakan ini perlu dinyatakan secara tepat, mudah dipahami, dan efektif dalam praktiknya. Efisiensi pelaksanaan kebijakan whistleblower perlu ditingkatkan untuk keberhasilan pencegahan *Fraud* karena :

2.2.2.1.1. Perlindungan kepada *Whistleblower* yaitu Bank harus berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi internal dan menawarkan bantuan dan perlindungan lengkap kepada setiap

⁴² Cut Fitrika Syawalina, "Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Distrik Navigasi Kota Sabang," *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 10, no. 1 (2020): 80–88.

⁴³ Galan Nur Subhi and Indrawati Yuhertiana, "Peran SDM Dan Teknologi Informasi Pada Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual," *Equity* 24, no. 2 (2021): 141.

⁴⁴ Eko Sudarmanto and Citra Kharisma Utami, "Pencegahan *Fraud* Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 195.

pelapor *Fraud* . Pemberian hadiah atau reward kepada pelapor yang menyampaikan laporan yang dipastikan akurat mengenai kecurangan dalam suatu perusahaan merupakan kemungkinan dalam *whistleblowing*.

2.2.2.1.2. Regulasi yang terkait dengan pengaduan *Fraud* Bank wajib menetapkan aturan internal untuk pengaduan *fraud* dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.1.3. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Pelaporan Fraud Bank telah memiliki sistem tersendiri untuk pelaporan fraud, dan memperjelas proses pelaporan, termasuk prosedur pelaporan, sarana dan personel yang bertanggung jawab untuk menangani laporan. Untuk mendukung sistem pelaporan, Bank telah menetapkan mekanisme tindak lanjut pelaporan kejadian fraud.

2.2.2.1.4. Implementasi Kebijakan Whistleblower Bank menerapkan kebijakan whistleblower yang ditujukan untuk transparansi dan konsistensi, memberikan kepercayaan kepada seluruh jajaran Bank akan keandalan dan kerahasiaan mekanisme pelaporan.

2.2.2.1.5. Informasi penghargaan pelapor dapat menentukan perlu tidaknya pengesahan dewan/SEVP setelah audit investigatif oleh SKAI (Satuan Tugas Audit Internal).

2.2.2.2. Surprise Audit Bank

Mengembangkan mekanisme unannounced review process, khususnya untuk unit-unit yang memiliki risiko lebih tinggi atau rentan terhadap fraud. Melakukan audit mendadak tanpa sepengetahuan karyawan untuk meningkatkan kepekaan karyawan terhadap seberapa baik tugas mereka dilakukan.

2.2.2.3. Surveillance System

Bank menyiapkan program sistem pemantauan, yang merupakan tindakan pengujian atau kontrol. Bank berupaya agar pihak yang diuji/diperiksa tidak mengetahui atau tidak menyadari bahwa sistem pemantauan sedang diterapkan untuk memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti Fraud. Pelaksanaan sistem pemantauan tersebut dapat memerlukan dukungan dari pihak dan/atau lembaga independen di dalam bank.

2.2.2.4. Line Management

Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari line management melakukan fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan melekat guna menemukan penyimpangan atau pelanggaran sebagai deteksi awal dalam pencegahan *fraud*.

2.2.3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

2.2.3.1. Investigasi memuat langkah-langkah untuk menggali informasi (investigasi, sistem pelaporan dan penerapan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, mencakup:

- 2.2.3.1.1. Investigasi dalam hal terjadi kecurangan atau indikasi atau dugaan kecurangan, Bank akan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti kecurangan. Audit Investigasi berarti standar investigasi yang berlaku dan berperkara berdasarkan hukum yang berlaku. Bank Dunia telah menetapkan prosedur standar untuk meninjau survei, yang paling tidak mencakup hal-hal berikut :
- 2.2.3.1.2. Identifikasi penyelidik, dengan mempertimbangkan independensi dan kompetensi yang diperlukan.
- 2.2.3.1.3. Mekanisme pelaksanaan survei untuk menindaklanjuti hasil survei dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.

2.2.3.2. Pelaporan Bank

Menerapkan mekanisme pelaporan yang efektif untuk investigasi dan temuan insiden penipuan, termasuk:

- 2.2.3.2.1. Mekanisme pelaporan meliputi pelaporan kepada Dewan/SEVP, Dekom dan Pengawas Perbankan.
- 2.2.3.2.2. Mekanisme pelaporan yang menjadi kewajiban Bank untuk melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan berarti ketentuan regulator yang berlaku antara lain pelaporan dan/atau koreksi laporan fraud yang berdampak signifikan dan pelaporan dan/atau koreksi laporan anti fraud.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

2.3. Profil PT. Bank Syariah Indoensia Kantor Cabang Pembantu Semarang MT Haryono

Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) MT Haryono Semarang pertama kali melakukan akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 19 Desember 2007 , 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Pada tanggal 1 Januari 2009, PT Bank BRI Syariah menandatangani Akta Pendirian Unit Usaha Syariah (spin-off) PT Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), posisinya diperkuat dan Tbk bergabung dengan PT Bank BRISyariah ditandatangani oleh Bapak Sofyan Basir, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk.) dan Bapak Ventje Rahardjo, Direktur Utama PT. Bank BRISyariah. Saham PT Bank BRI Syariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk.) dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero, Tbk) Yayasan Kesejahteraan Pekerja. Dari tahun 2011 hingga 2013, PT Bank BRI Syariah berulang kali diakui sebagai bank syariah dengan pertumbuhan tercepat kedua, bank syariah pertama yang menawarkan layanan mobile banking di empat toko online, dan badan amal pertama di Indonesia yang menggunakan penarikan ATM Penerbitan perbankan syariah institusional, menang Penghargaan Promosi Museum Rekor Indonesia, Juara Token Jamaah Kelas Menengah Indonesia.

Pada tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah digabung menjadi satu entitas, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Penggabungan ketiga bank tersebut bertujuan untuk mempercepat perkembangan industri perbankan syariah Indonesia secara nasional dan menjadi sumber energi baru bagi perekonomian Indonesia untuk bersaing secara global.

2.4. Visi dan Misi

Visi Bank Syariah Indonesia : Visi Bank Syariah Indonesia “Top 10 Global Islamic Bank”

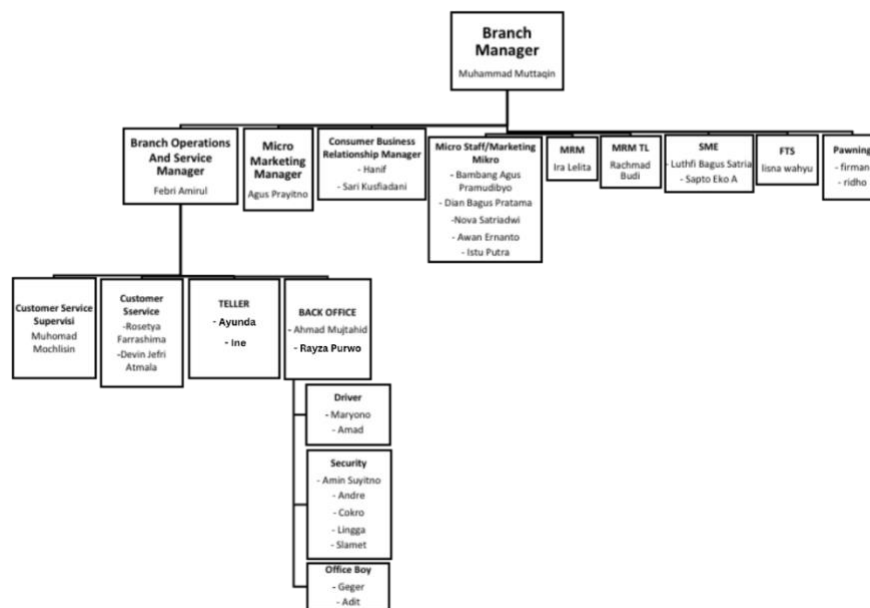
Misi Bank Syariah Indonesia:

- 2.4.1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia Melayani > 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2005.

- 2.4.2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2).
- 2.4.2.1. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia
- 2.4.2.2. Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen paada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.
- 2.5. Struktur Organisasi

Gambar 3.1.

Struktur organisasi BSI KCP Semarang MT Haryono



Adapun tugas dari masing-masing jabatan antara lain sebagai berikut :

- 2.5.1. Branch Manager, bertugas sebagai memimpin dan mengawasi kegiatan manajemen, memastikan bahwa semua unit bisnis di bawah koordinasinya mencapai sasaran kinerja dengan cara yang bertanggung jawab, dan membuat keputusan keuangan dalam lingkup kekuasaannya.
- 2.5.2. Branch Operational dan Service Manager, Memastikan seluruh kegiatan operasional Kantor Cabang dilaksanakan sesuai dengan aturan guna mendukung pencapaian target Kantor Cabang.
- 2.5.3. Micro Marketing Manager, Mengelola dan bertanggung jawab terhadap implementasi strategi pengembangan dan pencapaian bisnis mikro dan branchless banking secara efektif,

efisien dan prudent di Branch Office.

- 2.5.4. Consumer Bussines Relationship Manager (FTS), untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan nasabah atau pelanggan BSI.
- 2.5.5. Micro staff, memasarkan pembiayaan, menganalisa pembiayaan serta bertanggung jawab atas pembiayaan tersebut.
- 2.5.6. Pawning, melaksanakan aktivitas pemasaran, akuisisi nasabah terkait layanan gadai untuk mencapai target laba dan kinerja pawning yang telah ditetapkan secara prudent.
- 2.5.7. SME (Small Medium Enterprise), merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Yang dimaksud berdiri sendiri adalah usaha kecil menengah (UKM) atau SME ini harus dijalankan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dari model usaha lain.
- 2.5.8. Customer supervisi, merupakan tangan kanan dari BOSM. Selain itu, Melaksanakan tugas dan kewajiban tambahan yang digariskan dalam kebijakan internal Bank, sesuai dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan syariah, dan tanpa melanggar tata kelola perusahaan yang baik
- 2.5.9. Customer Service, Memberikan penjelasan kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk-produk maupun syarat-syarat serta tata cara prosedurnya.
- 2.5.10. Teller, melayani kegiatan transaksi nasabah seperti setor tunai, penarikan dana, dan transfer. Back office, mengelola laporan keuangan, melakukan pengecekan invoice dan pemesanan, serta bertanggung jawab terhadap pengecekan barang fast moving ataupun yang slow moving.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Implementasi Strategi Anti-Fraud Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono

Adapun mekanisme implementasi strategi anti *fraud* PT Bank Syariah Indonesia antara lain sebagai berikut :

4.1.1. Adanya SOP dan Unit Khusus yang menangani *Fraud*

Menurut wawancara dengan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu Rayza Purwo bagian back office, “*bahwa SOP mengatur ketentuan di setiap bagian, dan selanjutnya di setiap bagian dilakukan sesuai prosedur. SOP ini merupakan mekanisme penerapan strategi anti fraud yang pertama*”.⁴⁵ Dalam wawancara Yusuf Suwandi, selaku *Regional Business Control*, dijelaskan “*bahwa keberadaan SOP berfungsi sebagai panduan bagi RBC untuk membandingkan prosedur SOP standar dengan kenyataan, sehingga jika ada perbedaan, itu berarti ada tanda-tanda penipuan atau penyimpangan*”. Hal itu juga menjadi mekanisme untuk mewujudkan strategi anti *Fraud* sebagaimana yang dijelaskan oleh Muchlisin salah satu karyawan.

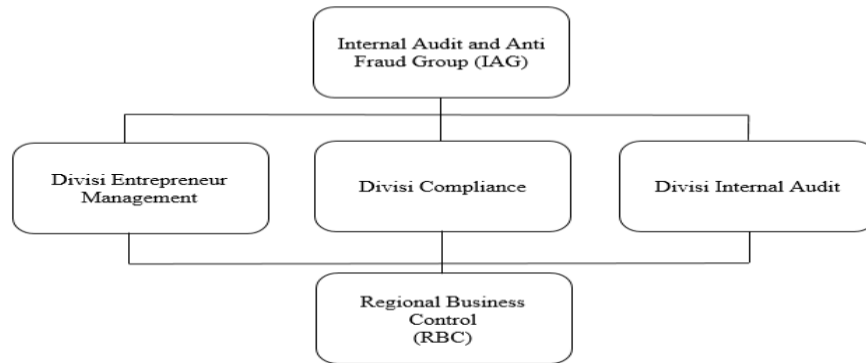
Menurut wawancara dengan Yusuf Suwandi sebagai RBC dan Mohammad Muchlisin sebagai Customer Supervisi yaitu bahwa “*untuk Unit Khusus Anti Fraud pada PT Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono tidak memiliki struktur Unit Khusus Anti Fraud dan untuk struktur Unit Anti Fraud PT Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono mengikuti di Kanwil (Kantor Wilayah). Jadi hal ini merupakan salah satu kelemahan dari PT Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono*”.⁴⁶ BSI KCP Semarang MT Haryono hanya mendapatkan arahan dari Unit Anti *Fraud* dari Kanwil dan yang akan memantau secara langsung segala kegiatan secara langsung adalah dari Pimpinan dari Bank BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu *Branch Manager, Branch Operation and Service Manager, dan Customer Supervisi*. Berdasarkan dari hasil wawancara, bahwa Kantor BSI KCP Semarang MT Haryono yang menjadi gawang pertama untuk memastikan seluruh transaksi telah sesuai dengan SOP yang ada

⁴⁵ Wawancara dengan Rayza Purwo sebagai Karyawan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2022

⁴⁶ Wawancara dengan Yusuf Suwandi dan Mohammad Muchlisin sebagai Karyawan, pada hari Selasa dan Jum'at, tanggal 21 dan 25 November 2022

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BSI Kantor Wilayah VII Semarang Unit Anti Fraud.



Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu Gambar di atas menjelaskan bahwa BSI KCP Semarang MT Haryono tidak mempunyai unit khusus Anti *Fraud*. Untuk atrukturnya berada di bawah pengelolaan IAG (Internal Audit *Group*) yang berada di kantor wilayah. Berlandaskan Wawancara dengan Bapak Yusuf Suwandi selaku Regional Bisnis Control BSI Area Semarang yang ditempatkan di BSI KCP Semarang MT Haryono, “*bahwa unit pengendali anti fraud ada beberapa divisi yang pertama entrepreneur management, untuk pembuatan prosedur ketentuan. Divisi kedua adalah compliance yang memiliki tugas lebih kepada proses pemeriksaan dari ketentuan tersebut. Ketiga adalah divisi internal audit yang melakukan tindak lanjut atas aktivitas yang sudah berindikasi fraud dan terakhir ada Regional Business Control (RBC) bertugas memastikan efektifitas internal control, mitigasi risiko, penerapan kepatuhan terhadap aktivitas operasional (pembiayaan dan non pembiayaan) Unit Kerja, dan investigasi*”.⁴⁷

SOP (Standar Operasional Prosedur) tinjau (evaluasi) tindakan untuk manajemen umum dan masalah teknis, lalu tinjau operasi RBC, lalu ambil tindakan korektif. Tindakan perbaikan meliputi tindakan pencegahan, tindakan deteksi, tindakan perbaikan dan tindakan, dilanjutkan dengan penerapan risiko operasional, penerapan risiko kepatuhan, dan hasil akhir baru adalah pelaksanaan hasil verifikasi. Tinjauan teknis implementasi berdasarkan informasi awal. Setelah melakukan pelaksanaan review, Langkah selanjutnya yaitu mengverifikasi kegiatan operasionalnya, apakah hal itu baik untuk bisnis atau operasionalnya yang akan dicantumkan dalam SOP.

⁴⁷ Wawancara dengan Yusuf Suwandi sebagai Karyawan, pada hari Jum’at, tanggal 25 November 2022

Selanjutnya, Ketika hasil tersebut telah ada, maka hasil tersebut akan dilakukan. Tindakan tersebut berupa tindakan preventif, detektif, korektif, dan *action*. Untuk itu, dengan berbagai prosedur yang telah dilakukan, maka implementasi strategi anti *fraud* dapat dilakukan.

Pelaksanaan hasil review tersebut merupakan hasil akhir baru setelah penerapan risiko operasional dan penerapan risiko kepatuhan yang merupakan tindakan korektif. Tindakan preventif, detektif, korektif, dan tindakan semuanya termasuk dalam tindakan korektif. Dari titik awal, penilaian teknis pelaksanaan dilakukan terlebih dahulu, diikuti dengan peninjauan dan verifikasi jenis kegiatan operasional yang juga tercakup dalam SOP pada tingkat bisnis dan operasional. Hasil akan menyusul, disertai dengan informasi tentang langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan dan bagaimana penerapannya dalam hal risiko operasional dan kepatuhan.

4.1.2. Upaya Pencegahan *Fraud*

Upaya pertama pencegahan kecurangan melibatkan kampanye anti kecurangan secara berkala di media, pernyataan pakta integritas, peningkatan kesadaran karyawan, dan rotasi karyawan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu Hanif Kurniawan yang menjelaskan “*bahwa RBC memiliki agenda untuk melakukan pemeriksaan berkala selama kurang lebih enam bulan, kunjungan, dan sosialisasi ke setiap cabang ke depannya. Misalnya, sosialisasi terkait internal control khusus untuk teller dan customer service dilakukan setiap satu sampai tiga bulan sekali. Selain itu, yang mengelola hubungan konsumen-bisnis, semakin mendukung gagasan bahwa kampanye poster anti penipuan juga dijalankan menggunakan media WhatsApp dan email*”.⁴⁸

Selain itu, kegiatan sosialisasi digunakan untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap upaya pencegahan *fraud*. Menurut wawancara dengan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono Mohammad Muchlisin, “*hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus penipuan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono. Adanya Pakta Integritas yang wajib dibaca setiap pagi juga berfungsi untuk menyebarkan kesadaran. Alhasil, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono akan mensosialisasikan budaya anti fraud. Pakta integritas adalah suatu*

⁴⁸ Wawancara dengan Hanif Kurniawan sebagai Karyawan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2022

bentuk kesepakatan antar rekan kerja untuk melarang tindakan curang dengan tetap menjaga satu sama lain”.⁴⁹

Pelaksanaan Rotasi Karyawan Rutin sesuai dengan wawancara dengan Bapak Yusuf Suwandi (2022) yang menyatakan bahwa rotasi karyawan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono biasanya berlangsung dalam jangka waktu satu sampai tiga tahun, merupakan upaya lain untuk mencegah terjadinya *fraud*. Wawancara Hanif Kurniawan (2022) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa rotasi personal dapat melibatkan perpindahan posisi di cabang yang sama atau antar cabang. Secara umum, rotasi membutuhkan waktu antara satu hingga tiga tahun untuk menyelesaikannya.

Pimpinan cabang menentukan bahwa prioritas biasanya untuk mengisi kekosongan, yang dapat dilakukan dengan pindah ke cabang lain atau memindahkan bagian dalam cabang yang sama dan rotasi pegawai dilakukan secara periodik tergantung keputusan pimpinan ini. Selanjutnya jika tanggung jawab PT. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono sebagian tanggung jawab tersebut ada di RBC dan RBC sendiri ditempatkan di area. Akibatnya, RBC lebih fokus pada tindakan pencegahan seperti peringatan dini. RBC akan secara aktif mengawasi prosedur anti-*fraud* di tingkat cabang untuk memastikan prosedur tersebut lebih fleksibel, efektif, dan siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Regional Business Control (RBC) dikaitkan dengan simpul upaya pencegahan dengan kampanye Anti *Fraud*, Pakta Integritas, dan *Employee Awareness Raising* karena kegiatan tersebut sebenarnya diawasi dan dilakukan oleh RBC.

Dari berbagai pernyataan diatas implemmentasi pencegahan *fraud* yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

4.1.2.1. Sosialisasi ke setiap kantor BSI yang ada di Kota Semarang.

Sosialisasi yang dimaksud dalam hal ini adalah RBC beserta staffnya selaku divisi dari unit anti *fraud* sendiri yang akan melakukan sosialisasi di setiap kantor-kantor BSI yang ada di Kota Semarang. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan sekaligus peringatan dini mengenai *fraud* kepada seluruh karyawan. Sosialisasi ini dilakukan hanya satu sampai dua kali dalam setahun yang berlandaskan pada wawancara karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono.

4.1.2.2. Mengembangkan budaya *zero torelance* anti *fraud*

⁴⁹ Wawancara dengan Mohammad Muchlisin sebagai Karyawan, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2022

Pengembangan budaya zero tolerance yang diimplementasikan di BSI KCP Semarang MT Haryono adalah komitmen terhadap kejujuran, kepercayaan, dan integritas. Selain prosedur pengendalian intern, peraturan perusahaan, kode etik, dan implementasi Pakta Integritas. Kejujuran dan kepercayaan merupakan kunci utama dalam bekerja. Sebagai karyawan di BSI KCP Semarang MT Haryono hendaknya selalu mengingat kembali tujuan dalam mencapai target setiap unit atau divisi.

4.1.2.3. Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *fraud* bagi konsumen.

Program yang dimaksud dalam hal ini adalah Pembuatan brosur anti *fraud*, banner, poster, dan lain-lain sebagai pengingat bagi nasabah atau pegawai.

4.1.2.4. *Know your employee* (mengenali karyawan)

Mengenalinya karyawan dalam BSI KCP Semarang MT Haryono sendiri mempunyai dua cakupan yaitu pada saat perekrutan karyawan baru dan rotasi pegawai ataupun mutasi. Adanya perekrutan karyawan baru tentunya dari pimpinan sendiri wajib halnya mengetahui latar belakang hidup karyawan. Karena hal itu sangat penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Kemudian beda halnya dengan rotasi, bahwa hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pegawai lebih berkomitmen terhadap perusahaan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa seberapa komitemen karyawan terhadap perusahaannya.

4.1.2.5. Pengamanan dengan teknologi

Pengamanan dengan teknologi di BSI KCP Semarang sendiri belum mempunyai IT tersendiri. Untuk IT sendiri, BSI KCP Semarang MT Haryono kembali lagi berpacu pada IT pusat. Akan tetapi untuk pengamanannya sendiri dapat dikatakan telah aman. Salah satunya yaitu dengan setiap karyawan mempunyai user dan password tersendiri. Apabila user tersebut dibuka pada saat diluar jam kerja, maka hal itu terdeteksi di pusat.

4.1.2.6. Manajemen SDM

Manajemen SDM yang dilakukan oleh BSI KCP Semarang MT Haryono dengan cara mengikuti pelatihan ataupun seminar yang diadakan dari pusat. Hal itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan divisinya masing-masing. Dengan adanya seperti itu, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas karyawan.

4.1.3. Upaya Pendeteksian *Fraud*

Pendeteksian *fraud* pertama kali dilakukan melalui whistleblowing system (WBS). Pada BSI KCP Semarang MT Haryono kebijakan WBS yang merupakan dasar pedoman dalam menangani

pelaporan atau pengaduan pelanggaran terdiri atas sosialisasi WBS secara berkesinambungan kepada para pegawai dan mekanisme pengaduan pada WBS. Karena WBS merupakan bagian dari mekanisme kebijakan anti *fraud* yaitu RBC dan staffnya maka perlu mengetahui kebijakan anti *fraud* yang diterapkan di BSI KCP Semarang MT Haryono serta memiliki kemampuan untuk dapat mengelola WBS guna mendorong efektivitas dalam implementasinya agar pengaduan yang dilakukan melalui WBS dapat segera teratasi dan ditindaklanjuti. Hal ini juga merupakan salah satu kelemahan dari pendeteksian *fraud* yang ada di BSI KCP Semarang MT Haryono. Dalam kebijakan anti *fraud* Bank Syariah Indonesia terdapat beberapa pendeteksian salah satunya adanya surveillilance system yaitu melakukan pengecekan atau pemantauan secara tiba-tiba di bank BSI KCP Semarang MT Haryono. Hendaknya hal tersebut harus dilakukan. Akan tetapi untuk hingga detik ini hal tersebut belum dilakukan. Dari pernyataan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono bahwa setiap akan melakukan pengecekan atau pemantauan dari tim audit atau dari pimpinan, sebelumnya akan diinformasikan terlebih dahulu kepada karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono. Oleh karena itu, hendaknya dari BSI KCP Semarang MT Haryono mengimplementasikan upaya pendeteksian *fraud* yang lain.

4.1.4. Upaya Investigasi, pelaporan, dan sanksi

Laporan Investigasi dan tindak lanjut laporan *fraud* dapat ditangani oleh RBC atau Internal Audit tergantung siapa yang diperiksa, posisinya apa, seberapa besar, atau mendesaknya. Berdasarkan wawancara dengan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono Yusuf Suwandi, “*upaya untuk menindaklanjuti laporan tersebut harus dikoordinasikan melalui RBC dan IAG. Terkait prosedur, terlihat bahwa peran staf RBC adalah melakukan investigasi awal, sedangkan kantor pusat yaitu internal audit hanya akan mengambil tindakan segera jika memang telah terpantau adanya tindakan kecurangan. Regional Business Control (RBC) akan melakukan pemeriksaan dari awal hingga akhir mengikuti prosedur pengajuan atau pemeriksaan yang menemukan tanda-tanda kecurangan, dan selanjutnya akan menulis laporan pemeriksaan yang akan disampaikan kepada kantor pusat atau Internal audit khususnya*”.⁵⁰

Regional Business Control (RBC) hanya akan menyampaikan laporan dan hanya akan menjadi database kantor pusat bahwa telah terjadi kasus modus atau prosedur seperti ini beserta besarnya kerugian yang timbul, tergantung dari hasil pemeriksaan apakah memang menunjukkan kecurangan tetapi apakah tidak menimbulkan kerugian apapun. Kantor pusat kemudian

⁵⁰ Wawancara dengan Yusuf Suwandi sebagai Karyawan, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022

memutuskan bagaimana karyawan yang melanggar kebijakan tersebut akan dieksekusi berdasarkan rekomendasinya. Penipu dapat dihukum dengan diberhentikan sebagai akibat dari tindakan mereka. Hal ini berdasarkan wawancara dengan karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono Hanif Kurniawan dan Mohammad Muchlisin yang menyatakan “*bahwa setelah sanksi diumumkan, seperti terlapor diminta mengundurkan diri, selesai sampai terlapor mengundurkan diri. Namun jika ada kerugian finansial yang harus dipenuhi terlebih dahulu, berapakah kerugian yang harus dipenuhi oleh terlapor, misalnya kerugian sebesar \$100 juta, jika terlapor tidak dapat mengembalikannya nanti akan ada penanganannya dari kantor pusat*”.⁵¹

Menurut wawancara dengan Bapak Yusuf Suwandi (2022), sanksi bagi pelaku penipuan yang dianggap ringan dapat berupa Surat Peringatan. Sanksi yang paling berat adalah PHK bagi pelaku penipuan pertama, namun jika mengakibatkan kerugian finansial maka akan dihukum penjara (SP). Banyak pelanggaran yang tidak dilaporkan ke polisi, namun karyawan yang bersangkutan diminta berjanji untuk bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Yusuf Suwandi selaku karyawan dalam wawancaranya, beliau menegaskan “*bahwa yang dikenakan sanksi adalah termasuk orang-orang yang dianggap terkait meskipun tidak ikut serta secara langsung tetapi tetap akan dikenakan surat peringatan, berlaku untuk dua tingkat di atas dan dua tingkat di bawah*”.⁵²

RBC merupakan aktor utama dalam melakukan pemeriksaan atau mengawal proses pada kantor BSI KCP Semarang MT Haryono karena bersentuhan langsung. Upaya tindak lanjut atas laporan *fraud* yang berkembang menjadi kasus adalah pendampingan kasus *fraud*. Misalnya, jika kantor menerima informasi transaksi atau proses yang tidak sesuai aturan, maka informasi tersebut akan diteruskan ke kantor pusat yang akan mengambil keputusan akhir. Tindak lanjut Laporan investigasi dibuat sebagai bagian dari upaya koordinasi RBC dan Internal Audit untuk *Regional Business Control* (RBC). Namun Unit Audit Internal Khusus Anti *Fraud* dan *Internal Audit Group* (IAG) bertugas melaksanakan Sanksi bagi Pelaku *Fraud*. Koneksi serupa ada antara *fraud case control* dan unit khusus anti-*fraud Grup Audit Internal* (IAG).

⁵¹ Wawancara dengan Hanif Kurniawan dan Mohammad Muchlisin sebagai Karyawan, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022

⁵² Wawancara dengan Yusuf Suwandi sebagai Karyawan, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022

4.1.5. Upaya Pengawasan dan tindak lanjut *Fraud*

“Melalui pertukaran informasi antar karyawan RBC, upaya pengendalian fraud pertama dilakukan dengan mengidentifikasi kerentanan risiko. Hal ini agar RBC dapat meninjau data karena kantor pusat tidak dapat mengunjungi cabang secara langsung untuk menindaklanjuti laporan. Terlihat bahwa RBC melakukan pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan dan berfungsi sebagai tindakan cadangan karena frekuensi kunjungan kantor pusat jarang lebih dari sekali setahun atau setiap beberapa tahun sekali karena ukuran Indonesia” hal ini berdasarkan wawancara dengan Yusuf Suwandi.⁵³

Dengan dibuatnya RBC ini dimaksudkan agar pengawasan di kantor cabang menjadi lebih fokus sehingga permasalahan yang ada dapat segera diatasi. Eksekusi, bagaimanapun, tetap di kantor pusat jika muncul masalah yang mengakibatkan prosedur penipuan. Selanjutnya menurut Bapak Hanif Kurniawan (2022) dan Bapak Rayza Purwo (2022), ada banyak cara untuk memantau, diantaranya ada yang menggunakan CCTV, pengawasan langsung, pemantauan aktivitas kerja, pemantauan aktivitas di luar pekerjaan, bahkan pemantauan aktivitas media sosial.

Sebaliknya, RBC melakukan pengawasan yang lebih langsung, misalnya terhadap mereka yang diduga melakukan kecurangan. Kami juga dapat menggunakan data untuk memeriksa data. Misalnya ada pihak internal yang menarik dana nasabah, kita bisa mengecek data mutasi transaksi. Periksa informasi staf juga selagi bisa. Upaya pemantauan lainnya dilakukan oleh audit Pihak Internal audit. Tanggalnya dari pemantauan tersebut sangatlah tidak menentu atau teracak, kalau kantor pusat biasanya setahun sekali, kalau CCTV hanya digunakan sebagai alat bukti pendukung untuk mencari bukti autentik.

Pihak ketiga atau auditor luar juga dapat melakukan audit yang tidak terduga. Menurut wawancara Rayza Purwo selaku *Back Office* di BSI KCP Semarang MT Haryono, “pengendalian internal di BSI KCP Semarang MT Haryono sendiri belum pernah adanya surprise audit, sampai sekarang ketika adanya audit tentunya diinformasikan terlebih dahulu. Sistem pengawasan juga digunakan dalam upaya pengendalian kecurangan”.⁵⁴

Melalui mekanisme *whistleblower*, dilakukan upaya pengawasan terhadap kecurangan-kecurangan tambahan. Ini dapat dicapai dengan mengkomunikasikan penyimpangan yang

⁵³ Wawancara dengan Yusuf Suwandi sebagai Karyawan, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022.

⁵⁴ Wawancara dengan Rayza Purwo sebagai Karyawan, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022

ditemukan ke RBC secara langsung. Menurut wawancara dengan Bapak Yusuf Suwandi (2022), RBC biasanya lebih langsung saat memfilter laporan awal karena mereka dapat langsung memeriksa laporan tersebut. Selain itu, RBC mensosialisasikan sistem whistleblowing BSI yang dapat diakses secara langsung maupun melalui mereka. Menurut wawancara tahun dengan Bapak Yusuf Suwandi (2022) , laporan akan mendapat perhatian lebih cepat jika disampaikan melalui RBC.

Pendekatan utama *whistleblowing* anti *Fraud* juga dapat dilakukan melalui website resmi yang disediakan oleh BSI, selain melalui RBC. Menurut wawancara dengan Bapak Yusuf Suwandi (2022), tidak sulit untuk mengakses website *whistleblower*. Menurut wawancara dengan Bapak Muchlisin (2022) dan Bapak Yusuf Suwandi (2022), semua pegawai BSI di Indonesia tercakup dalam sistem whistleblowing online, sehingga setiap pegawai cabang BSI dapat melaporkan melalui sistem ini. Setelah pusat menerima laporan *whistleblower*, dan nantinya direksi dan audit menyelidiki apakah laporan tersebut akurat atau tidak.

Bahkan, metode whistleblowing telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui website resmi dan email, menurut wawancara dengan Bapak Yusuf Suwandi (2022) Setiap Kantor BSI dimanapun diharapkan untuk mencetak dan menerbitkan poster anti penipuan selain email yang dikirimkan. Inisiatif pengawasan Identifikasi eksposur risiko, pemeriksaan rutin yang berkaitan dengan *Regional Business Control* (RBC), penerapan audit internal mendadak, penggunaan sistem pengawasan, dan pelaporan pelanggaran terkait dengan *Regional Business Control* (RBC) merupakan komponen penting dari pelaksanaannya.

Adapun Implementasi strategi anti *fraud* yaitu bahwa Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono telah melaksanakan strategi anti *fraud sesuai dengan* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 1 Januari 2020, tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum yaitu yang telah memenuhi empat pilar utama dalam sistem pengendalian *fraud* yang terdiri atas pilar pencegahan, deteksi, investigasi dan pelaporan.

Adapun Strategi yang diimplementasikan oleh BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu sosialisasi ke cabang-cabang mengenai sistematis anti *fraud*, melakukan *Fraud Risk Assessment* yang merupakan proses identifikasi, mengukur, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan BSI KCP Semarang MT Haryono, Mengembangkan budaya *zero tolerance* anti *fraud* , Program kepedulian dan

kewaspadaan terhadap *fraud* bagi konsumen, *Know your employee* (mengenali karyawan), pengamanan dengan teknologi, manajemen SDM serta *Whistleblowing System* yang dilakukan dengan untuk mengetahui peningkatan jumlah pelaporan atas tindakan *fraud*, tanpa diketahui pihak pelapor dan pelapor dan yang hanya yang mengetahui adalah direksi dan audit.

4.2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu karyawan BSI KCP Semarang MT Haryono Bapak Muchlisin menyatakan “bahwa Pengembangan SDM pada SDM BSI KCP Semarang MT Haryono Unit Anti *Fraud*nya, diawali dengan perekrutan karyawan dengan kualifikasi khusus. BSI juga merupakan melakukan hal yang jelas ada seleksi awal nanti ada beberapa macam seperti psikotes dan tes lain, dari situ lah tim yang merekrut bisa menyimpulkan ini layak atau kompeten tidak. Biasanya kantor cabang melakukan sesuai kebutuhan pegawai jika cabang yang membutuhkan, tapi nanti pusat tetap menentukan karena kita juga mengajukan ke kantor pusat, nanti dilihat di berkasnya ada kurang atau tidak,dan jika terpenuhi nanti kita lanjutkan ke area lalu ke kanwil baru ke kantor pusat”.⁵⁵ Pengembangan SDM BSI KCP Semarang MT Haryono melakukan Pelatihan serta Sertifikasi. Dengan adanya pelatihan dan sertifikasi itu sangat penting dalam pengembangan SDM khususnya dalam mengimplementasikan strategi anti *Fraud*. Pelatihan dan Sertifikasi dilakukan oleh kantor Pusat. Pelatihan dan sertifikasi dikantor pusat dilaksanakan setiap tahun sekali atau sekali dalam 6 bulan tergantung dengan kebutuhan dari kantor pusat.

Dalam wawancara Rayza Purwo menjelaskan “bahwa training lebih diutamakan untuk karyawan yang baru masuk, baik baru gabung ke BSI atau gabung ke jabatan baru, jadi training itu untuk memperlancar proses pelaksanaan di jabatan yang baru. Pelatihan dan Sertifikasi diberikan Sesuai Level jabatan.Selain itu bahwa sertifikasi dilakukan setahun sekali atau 6 bulan sekali tetapi tidak semua jabatan mendapatkan pelatihan dan sertifikasi karena tergantung jabatan level jabatannya, dan kebutuhan dari BSI KCP MT Haryono sendiri”.⁵⁶

Sedangkan dari penelitian terdahulu menurut Hanif Ardianto (2020) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa “Pengembangan SDM di antaranya juga dilakukan melalui Otorisasi Perekrutan yang hanya boleh dilakukan oleh Kantor Pusat. Proses Rekrutmen harus dilakukan dengan

⁵⁵ Wawancara dengan Mohammad Muchlisin sebagai Karyawan, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022

⁵⁶ Wawancara dengan Yusuf Suwandi sebagai Karyawan, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022

persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat. Namun cabang melakukan tes sesuai dengan perintah kantor pusat, hasilnya diberikan oleh kantor pusat terlepas dari lulus atau tidak. Pengembangan SDM juga dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi. Dalam Pengembangan SDM pada Unit Anti *Fraud* terdapat pendidikan atau training untuk menghindari Anti *Fraud* seperti sertifikasi manajemen risiko.”

Pengembangan talenta di bidang anti fraud juga dapat melibatkan perekrutan karyawan dengan kualifikasi khusus sejak awal. Persetujuan kerja yang hanya dapat dilakukan oleh kantor pusat kemudian dibarengi dengan pelatihan, sertifikasi, seminar atau workshop manajemen. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa upaya pengawasan terkait dengan pengembangan sumber daya manusia untuk pencegahan kecurangan, seperti memperoleh sertifikasi kepatuhan. Dari uraian di atas, terkandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

4.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia harus direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dikelola agar dapat mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Tercapainya tujuan organisasi tergantung pada kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dan sumber daya manusia selalu berperan aktif dan memimpin dalam berbagai kegiatan organisasi. Orang adalah aset yang paling dasar dan penting dari sebuah organisasi. Tanpa sumber daya manusia, roda organisasi tidak dapat berputar. Untuk membangun organisasi yang baik, organisasi harus berfungsi dengan baik.

Menurut Ketua LPFA (Lembaga Pengembangan Fraud Audit), kinerja staf dalam mencegah, mendeteksi, menentukan terjadinya fraud, menghitung kerugian yang signifikan akibat fraud, serta mendukung proses penyelesaian hukum dan upaya pemulihan aset melalui aset tracking didasarkan pada Standar Keahlian Kerja Lapangan Ujian Forensik Nasional Indonesia (SKKNI AF), Tenaga Kerja yang Dibutuhkan untuk Bidang Ujian Forensik. Keterampilan yang diperlukan meliputi pencegahan dan deteksi penipuan, pemeriksaan forensik, persiapan laporan ahli, perhitungan kerugian dan pelacakan aset.

Bagi keterampilan yang harus dimiliki ahli forensik menjadi dua tahap, yaitu tahap penerimaan dan tahap perencanaan kerja. Ketika menerima suatu posisi, auditor harus dapat menilai kesesuaiannya dengan posisi tersebut. Pertimbangkan pemahaman menyeluruh tentang investigasi penipuan dan hukum pada tahap ini. Selain itu, kemampuan asuransi pada tahap perencanaan kerja

harus mengidentifikasi jenis kecurangan yang terjadi, seberapa cepat atau kapan terjadinya kecurangan, siapa yang melakukannya, dan menghitung kerugian material yang diderita entitas yang diaudit. Pemeriksa forensik juga harus dapat menentukan cara terbaik untuk mengumpulkan bukti dan membuat rekomendasi untuk meminimalkan penipuan. Kompetensi SDM atau auditor hukum di bidang audit forensik menunjukkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas yang diberikan.

4.2.2. Pelatihan untuk karyawan

Untuk pelatihan sendiri dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan nantinya akan mendapatkan sertifikasi dalam bidangnya. Tujuan dari adanya pelatihan untuk karyawan sangat penting dalam menunjang kesuksesan dalam BSI KCP Semarang MT Haryono. Dengan adanya pelatihan dapat meningkatkan etos karyawan, kemampuan, profesionalitas, dan kinerja karyawan. Pelatihan untuk karyawan dalam mengembangkan sumber daya manusia, adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah sebagai suatu usaha perusahaan untuk mencapai tujuannya.

4.2.3. Pengembangan SDM Anti *Fraud*

Selain melalui pelatihan, SDM Tim Anti *Fraud* tentunya harus dikembangkan. BSI KCP Semarang MT Haryono tidak memiliki Tim Anti *Fraud* tersendiri sehingga perlu untuk dikembangkan. Pimpinan di BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu *Branch Manager dan Branch Operations and Service Manager*, dan *Customer Supervisi* yang menjadi bagian dari mengatasi *fraud* pada BSI KCP Semarang MT Haryono. Oleh karena itu, Tim Unit Anti *Fraud* sangat dibutuhkan dan dikembangkan di BSI KCP Semarang MT Haryono. Dengan adanya Unit Anti *Fraud* di Bank BSI KCP Semarang MT Haryono *dapat* memudahkan pimpinan BSI KCP Semarang dalam menjalankan tupoksinya. Oleh karena itu, berbagai kegiatan dilakukan secara informal untuk mendukung proses formal pencegahan dan pendeteksian kecurangan. BSI KCP Semarang MT Haryono selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja terkait lingkungan. Tujuannya agar dapat menemukan dan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kecurangan yang terjadi di departemen lain, serta mengamati perilaku karyawan yang tampak tidak biasa.

Temuan analisis data Upaya dalam mengembangkan kompetensi SDM BSI KCP Semarang MT Haryono dan Unit anti *fraudnya*, yaitu berupa pelatihan, penugasan, pengawasan serta proses rekrutmen SDM mengenai peningkatan kinerja yang dilakukan dalam mendeteksi serta mencegah *fraud*. Pengembangan SDM pada Unit Anti *Fraud* dilakukan sejak awal perekrutan karyawan dengan

kualifikasi khusus. Otorisasi Perekrutan yang hanya boleh dilakukan oleh Kantor Pusat dan kemudian diberikan pelatihan, sertifikasi, seminar maupun Workshop manajerial.

4.3. Kendala yang dihadapi Pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan terjadinya *fraud*

Dalam wawancaranya Bapak Yusuf Suwardi bahwa selama bekerja di BSI KCP MT Haryono mengalami kendala atau kesulitan ketika ingin melakukan pemeriksaan. Karena untuk pemeriksaannya sendiri hanya terdiri dari 3 orang RBC beserta Staff RBC. Karena untuk melakukan hal seperti itu memerlukan waktu yang tidak sebentar ditambah dengan harus mengunjungi seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang ada di seluruh Kota Semarang. Dengan adanya hal seperti itu tim RBC mempunyai kendala atau hambatan karena keterbatasan kewenangan seperti tidak bisa mengakses data pegawai sehingga harus menunggu dari pusat yang memerlukan waktu tersendiri . Kendala yang lain yang dihadapi adalah bahwa pelatihan yang tidak merata, setelah pelatihan dasar yang tidak mendapatkan pelatihan lagi dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan SDM yang tidak mendapatkan pelatihan ini menjadi kurang berkembang dan menyebabkan pengetahuan SDM tidak merata. Disisi lain di BSI KCP MT Haryono tidak memiliki Unit Khusus Anti *Fraud*. Dari uraian diatas, mengandung beberapa poin antara lain sebagai berikut :

4.3.1. Kekurangan SDM Tim Anti *Fraud*

Kekurangan SDM Anti *Fraud* merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh tim anti *fraud* dalam menindaklanjuti di setiap kantor BSI terutama kantor BSI KCP Semarang MT Haryono. Dalam wawancara Bapak Yusuf Suwardi (2022) yang menjelaskan “*bahwa RBC untuk di area Kota Semarang hanya mempunyai 3 orang beserta staffnya. Untuk melakukan terjun ke lapangan mengenai kasus fraud mengalami kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama jika melihat dari kantor BSI yang akan di sosialisasikan*”⁵⁷. Hal ini telah terbukti bahwa dalam melakukan pemantauan terhadap pendeteksian terjadinya *fraud* sangat memerlukan SDM atau Unit khusus yang mengatasi terjadinya *fraud*. BSI KCP Semarang MT Haryono sendiri, yang melakukan pemantauan mengenai indikasi terjadinya *fraud* adalah pimpinan dari BSI KCP Semarang MT Haryono. Jadi, dengan hal seperti itu terbukti bahwa sangat dibutuhkannya SDM Unit Anti *Fraud* di BSI KCP Semarang MT Haryono.

⁵⁷ Wawancara dengan Yusuf Suwardi sebagai Karyawan, pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022

4.3.2. Pelatihan Belum Sepenuhnya Efektif

Kekurangan yang kedua dalam peningkatan kualitas SDM adalah pelatihan yang sepenuhnya belum efektif. Pelatihan menjadi strategi penting dalam peningkatan kualitas SDM PT BSI KCP Semarang MT Haryono. Akan Tetapi ,belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan karena tidak menentunya waktu metode pelatihan yang digunakan dan hanya beberapa kali dalam setahun. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanif R. (2020). Selain itu, bahwa pelatihan dalam menggunakan WBS, belum dilakukan hanya sebatas disosialisasikan saja dan diimplementasikan.

4.3.3. Tidak mempunyai struktur organisasi *fraud* tersendiri

BSI KCP Semarang MT Haryono tidak memiliki struktur unit *fraud* tersendiri. Untuk strukturnya hanya mengikuti dari Kanwil VII BSI Semarang. Dengan tidak adanya struktur tersendiri, hal ini dalam proses pengawasan proses pelaksanaan kegiatan di BSI KCP Semarang MT Haryono kemungkinan besar akan menimbulkan indikasi terjadinya *fraud*. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya *fraud*, BSI KCP Semarang MT Haryono harus membentuk struktur organisasi *fraud* tersendiri.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hanif R. (2020) menyatakan bahwa Kendala yang dihadapi oleh Unit Anti *Fraud* dalam Meminimalkan *Fraud* ada tiga yaitu :

- a. Kendala yang pertama adalah RBC memiliki akses terbatas karena semuanya sepenuhnya terpusat Tim RBC terbatas atau terhambat karena akses terbatas misalnya tidak ada akses ke data karyawan sehingga mereka harus menunggu di pusat yang membutuhkan waktu terpisah.
- b. Kendala berikutnya adalah keengganan untuk melaporkan kepada rekan kerja Hambatan ini terkait dengan kurangnya kesadaran akan tanda-tanda pelaporan kecurangan, yaitu merasa tidak nyaman melaporkan kecurangan karena merasa berteman.
- c. Hambatan Pelaporan lainnya adalah Slow follow up, yaitu lambatnya respon menyebabkan pegawai salah mengira bahwa pemerintah pusat tidak ada respon atau tidak ada respon pada teman cabang.

4.4. Peningkatan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalkan terjadinya *fraud*

BSI KCP Semarang MT Haryono meningkatkan pengetahuan, skill, *sharing knowledge* dan dan kerja tim yang baik dalam meminimalkan terjadinya *fraud*. Sebagai karyawan kita diberikan

amanah untuk bekerja dengan baik dan jujur sesuai yang diterapkan oleh BSI. Disisi lain cover karyawan dan bank adalah Syariah. Sedangkan dalam penelitian Hanif Rizky (2020) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa peningkatan yang dilakukan oleh BSM KC Yogyakarta dalam meminimalkan *Fraud* yaitu secara korelasional, kendala yang dihadapi dalam penegakan anti *fraud*, seperti peningkatan strategi anti *fraud*.

Menurut Chairunnisa dan Ibrahim Mahdan (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa, peningkatan yang harus dilakukan dalam meminimalkan terjadinya *fraud* yaitu Salah satunya adalah dengan meningkatkan pengendalian internal. PT X menerapkan pendekatan ini dengan memusatkan aktivitas strategis di kantor pusat. Dahulu kekuasaan pengelola pabrik relatif besar, dan masing-masing pabrik dapat dengan leluasa mengatur aktivitasnya sendiri, namun karena pengelola pabrik berkali-kali melanggar peraturan, pabrik kini hanya menjadi pelaksana pengambilan keputusan di kantor pusat. Pendekatan kedua, perbaiki, adalah melalui desain ulang proses bisnis PTX. Sebelumnya, sistem pembayaran dilakukan langsung ke masing-masing pemasar. Namun, karena departemen pemasaran menemukan kasus penipuan pembayaran oleh konsumen, perusahaan membuat akun perusahaan khusus untuk menerima uang dari pelanggan guna mencegah hal ini terjadi. Ketiga, memberikan sanksi yang berat kepada pelanggar untuk membentuk efek jera.

Adapun peningkatan yang dapat dilakukan dalam BSI KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalisir terjadinya *fraud* antara lain sebagai berikut :

4.4.1. Merekrut SDM Anti *Fraud*

Kekurangan SDM anti *fraud* merupakan salah satu kelemahan dari BSI KCP Semarang MT Haryono. Walaupun di Kanwil VII BSI Semarang terdapat unit anti *fraud*, hal itupun juga sangat *terbatas*. Terutama pada RBC yang melakukan eksekusi di lapangan dengan cakupan SDM terdiri dari 3 orang. Hal tersebut membuat proses investigasi dalam terjadinya *fraud* menjadi lambat. maka dari itu, perlu adanya SDM anti *fraud* khusus BSI KCP Semarang MT Haryono. Untuk memprediksi kemungkinan penipuan, perusahaan harus bekerja untuk mencegah atau mengatasinya. Selain itu, penipuan dapat menjadi batu sandungan yang menghambat operasi perusahaan. Hambatan ini mungkin bersifat finansial, seperti mengurangi keuntungan, atau mungkin bersifat budaya, mengurangi semangat kerja karyawan dan merusak sistem manajemen kerja.

4.4.2. Mengefektifkan Pelatihan secara keseluruhan

Karyawan merupakan modal terpenting dan kunci keberhasilan suatu perusahaan. Anda bisa membayangkan seperti apa perusahaan jika karyawan saat ini adalah karyawan yang kurang mampu. Mereka tidak dapat melakukan tugas yang sesuai dengan fungsinya dengan baik. Ini adalah pendidikan yang mencakup kegiatan kerja berkualitas tinggi, yang merupakan hal yang sangat penting. Menemukan karyawan yang berkualitas tidaklah mudah, dan dalam beberapa kasus bahkan mungkin tampak sulit. Tentunya pegawai BSI KCP Semarang MT Haryono membutuhkan kompetensi. Pengetahuan adalah keterampilan yang kompleks.

Pengetahuan karyawan juga menentukan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, dan karyawan dengan pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun bagi karyawan yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan bekerja dengan lambat. Pemborosan faktor produksi seperti bahan, waktu dan tenaga kerja disebabkan oleh pekerja berketerampilan rendah. Pemborosan ini meningkatkan biaya untuk mencapai tujuan bisnis. Kemampuan untuk melakukan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental. Memahami Tingkat Keterampilan Dapat Meningkatkan Hasil Perencanaan Tenaga Kerja.

4.4.3 Membuat struktur organisasi unit Anti *Fraud*

Berdasarkan Desain Organisasi dan Sumber Daya Manusia (2021) oleh Mariana Simanjuntak et al. Struktur organisasi adalah pola hubungan dan susunan berbagai komponen (satuan kerja) dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda diintegrasikan ke dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi. Mengutip News of the Day (2019) karya Andi Fachruddin, struktur organisasi berperan penting dalam menjaga hubungan baik antar unit kerja agar unit-unit tersebut dapat bekerja sama secara optimal.

Struktur organisasi juga memfasilitasi proses pengintegrasian fungsi-fungsi di dalam perusahaan sehingga dapat berfungsi secara efisien. Dalam Human Resource Management in the Age of Industrial Revolution 4.0 (2021), Prayogo Kusumaryoko menulis bahwa struktur organisasi juga memegang peranan penting, karena mengatur bagaimana koordinasi terjalin antara manajemen, karyawan, dan tim kerja. Oleh karena itu perlu adanya struktur organisasi unit Anti *froud* yang harus dibentuk oleh BSI KCP Semarang MT Haryono untuk mengatasi dan mengkoordinasi agar tidak ada terjadinya froud oleh karyawan dalam BSI KCP Semarang MT Haryono.

4.4.4 Mengefektifkan dalam mengidentifikasi kerawanan

Bapak Yusuf Suwardi selaku Regional Business Control (RBC) menjelaskan bahwa tujuan utama mengidentifikasi kerentanan adalah untuk memetakan risiko yang dapat timbul dari pihak internal maupun eksternal terhadap BSI KCP Semarang MT Haryono dan melemahkan bank. Tim Anti Fraud BSI KCP Semarang MT Haryono Sumber Daya Manusia perlu memahami dan memahami mekanisme kegiatan perbankan terkait dengan ketentuan OJK sebelum melanjutkan proses identifikasi risiko. Fitur ini dirancang untuk membantu SDM Tim Anti Fraud dalam mengidentifikasi potensi risiko di seluruh aktivitas BSI KCP Semarang MT Haryono, mulai dari prosedur pencairan kredit hingga kredit bermasalah. Proses identifikasi kerentanan juga merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko BSI KCP Semarang MT Haryono dan terdiri dari tiga proses antara lain:

1. Identifikasi dan Mitigasi

Identifikasi risiko yang dilakukan pada BSI KCP Semarang MT Haryono dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis sebagai berikut:

- a. Identifikasi Risiko ketika departemen manajemen risiko masing-masing unit mengidentifikasi risiko masing-masing unit, ada dua pilihan, yaitu mengidentifikasi langsung dengan unit terkait, atau unit terkait melaporkan terjadinya potensi risiko ke departemen manajemen risiko, dan manajemen risiko departemen. Undercut BSI KCP Semarang MT Haryono.
- b. Memantau Setiap Aktivitas Baru di BSI KCP Semarang MT Haryono melakukan monitoring ini terhadap seluruh aktivitas baru yang dilakukan di BSI KCP Semarang MT Haryono, baik aktivitas dengan pihak ketiga maupun aktivitas yang dilakukan di lingkungan BSI KCP Semarang MT Haryono. Seluruh aktivitas tersebut diperiksa oleh Departemen Manajemen Risiko untuk mengetahui apakah aktivitas tersebut mengandung risiko dan apakah akan melemahkan BSI KCP Semarang MT Haryono.
- c. Bagian Manajemen Risiko tidak memiliki pedoman khusus dalam menentukan aktivitas mana yang berpotensi melemahkan BSI KCP Semarang MT Haryono. Namun, tetap memantau enam jenis risiko yang dijadikan indikator, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis..

Langkah selanjutnya setelah mengidentifikasi risiko adalah mengidentifikasi tindakan mitigasi risiko berdasarkan risiko yang teridentifikasi. Mitigasi risiko berlaku untuk semua jenis risiko yang dapat melemahkan BSI KCP Semarang MT Haryono, termasuk risiko yang terkait

dengan pihak eksternal dan internal. Secara keseluruhan, langkah mitigasi risiko BSI KCP Semarang MT Haryono berupa beberapa proyek untuk memperkuat posisi BSI KCP Semarang MT Haryono. Tentu saja, untuk menerapkan proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko, departemen sumber daya manusia dari tim anti-fraud harus dapat menghasilkan laporan profil risiko. Dengan adanya tim anti-fraud, profil risiko dapat dilaporkan dengan benar, sehingga proses yang dijalankan sebelumnya juga harus dijalankan dengan benar.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko yang dilakukan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.03/2019 tentang eksekusi risiko, yang terbagi dalam enam kategori risiko, yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko likuiditas, risiko reputasi, dan risiko strategis yang dikelola BSI. Menurut OJK (2019), penilaian risiko yang dilakukan adalah penilaian risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada operasional BSI yang memiliki dampak finansial signifikan terhadap BSI, baik yang dapat diukur maupun yang tidak dapat diukur. Parameter yang digunakan untuk penilaian risiko adalah kuantitatif dan kualitatif. Parameter kuantitatif meliputi rasio kredit bermasalah, atau rasio total kredit bermasalah terhadap total kredit yang disalurkan, dan rasio pinjaman terhadap simpanan, atau rasio total kredit terhadap total pembiayaan pihak ketiga dari non lembaga keuangan.

3. Pelaporan Profil Risiko

Laporan Profil Risiko tersedia baik untuk pihak internal maupun eksternal BSI KCP Semarang MT Haryono. Untuk pihak internal, pelaporan bulanan kepada Pengurus BSI KCP Semarang MT Haryono dalam hal ini. Sekarang melapor ke OJK sebagai pihak eksternal setiap semester atau semesteran (Yusuf Suwardi, 2022). Laporan Profil Risiko memuat konten yang menjelaskan profil risiko PT BPR Bank Sleman berdasarkan risiko yang teridentifikasi, langkah mitigasi risiko dan hasil penilaian risiko yang dimuat di BSI KCP Semarang MT Haryono. Profil risiko disampaikan kepada Dewan Manajemen dan OJK dalam bentuk kertas. Dalam pelaporan profil risiko ini, bagian SDM tim anti fraud harus dapat melaporkan profil risiko dengan benar sesuai ketentuan yang ditetapkan OJK.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono telah melaksanakan strategi anti *fraud sesuai dengan* “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 39/POJK.03/2019 tanggal 1 Januari 2020, tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum yaitu yang telah memenuhi empat pilar utama dalam sistem pengendalian *fraud* yang terdiri atas pilar pencegahan, deteksi, investigasi dan pelaporan.” Adapun Strategi yang diimplementasikan oleh BSI KCP Semarang MT Haryono yaitu sosialisasi ke cabang-cabang mengenai sistematis anti *fraud*, melakukan *Fraud Risk Assessment* yang merupakan proses identifikasi, mengukur, dan menilai potensi risiko terjadinya *Fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan BSI KCP Semarang MT Haryono, Mengembangkan budaya *zero tolerance* anti *fraud*, Program kepedulian dan kewaspadaan terhadap *fraud* bagi konsumen, *Know your employee* (mengenali karyawan), pengamanan dengan teknologi, manajemen SDM serta *Whistleblowing System* yang dilakukan dengan untuk mengetahui peningkatan jumlah pelaporan atas tindakan *fraud*, tanpa diketahui pihak pelapor dan pelapor dan yang hanya yang mengetahui adalah direksi dan audit.

5.1.2. Upaya dalam mengembangkan kompetensi SDM di BSI KCP Semarang MT Haryono, B. Melakukan peningkatan kinerja dalam pendeteksian dan pencegahan kecurangan kerja berupa pelatihan, operasi dan pengawasan. Sejak awal, pengembangan talenta di BSI KCP Semarang MT Haryono telah melalui rekrutmen staf yang berkualifikasi khusus. Persetujuan rekrutmen hanya dapat dilakukan oleh kantor pusat, dilanjutkan dengan pelatihan, sertifikasi, seminar dan workshop manajemen. Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa kekuatan pengawasan sertifikasi kepatuhan terkait dengan pengembangan SDM anti Fraud RBC. Pengembangan RBC Fraud Officer dalam Pelatihan Terkait Pekerjaan Pengawasan.

5.1.3. Kendala yang dihadapi BSI KCP Semarang MT Haryono dalam meminimalisir terjadinya *fraud* yaitu SDM anti *fraud* yang terbatas, Pelatihan yang tidak merata Sebagian SDM sudah lama tidak mendapatkan pelatihan lanjutan setelah pelatihan dasar sehingga mengakibatkan SDM tidak berkembang dan pengetahuan SDM tidak seimbang, dan tidak

memiliki struktur organisasi khusus. Adapun peningkatan yang harus dilakukan dalam meminimalisir *Fraud* di BSI KCP Semarang MT Haryono adalah Merekrut SDM Anti *Fraud*, megefektifkan pelatihan secara keseluruhan, dan membuat struktur organisasi Unit Anti *Fraud* BSI KCP Semarang MT Haryono.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa keterbatasan studi ini yang dapat dilakukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya, yakni

- 5.2.1. Adanya kendala pada narasumber yang dibatasi dan dokumen atau informasi mengenai *fraud* pada Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono yang dirahasiakan karena ada beberapa hal yang tidak diperbolehkan untuk umum atau eksternal.
- 5.2.2. Peneliti tidak dapat mendeteksi penipuan eksternal dalam penelitian ini, karena penelitian ini hanya berfokus pada penipuan internal. Pada kenyataannya, ada kaitan antara kecurangan eksternal dan kecurangan internal. Penipuan eksternal dapat terjadi karena dukungan internal.

5.3. Saran

Berdasarkan pada masalah yang diteliti, peneliti hendak menyampaikan saran yang meliputi:

- 5.3.1. Perusahaan harus meningkatkan pelatihan mereka tentang penipuan perbankan untuk memastikan bahwa rencana anti-penipuan diterapkan seefektif mungkin.
- 5.3.2. Untuk membandingkan penerapan strategi anti *fraud* pada bank yang berbeda, mahasiswa dan peneliti dapat melakukan penelitian tentang implementasi strategi anti *fraud* pada institusi tersebut.
- 5.3.3. Selanjutnya untuk memperoleh gambaran strategi anti *fraud* yang lebih komprehensif, peneliti harus mencari sumber data tambahan dan lebih dalam melalui wawancara dengan kantor pusat Bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul, and Teguh Purwanto. "Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, Dan Ijarah Sebelum Dan Selama Pandemi Covid 19." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 900–907.
- Agus Sudarma, Komang, I Gusti Ayu Purnamawati, Program S Studi, and Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Akuntansi. "Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Kejujuran Dan Whistleblowing System Dalam Pencegahan *Fraud* Pada Pt. Bpr Nusamba Kubutambahan." *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 10, no. 3 (2019): 435–446.
- Amararenggana Dharmesti Ali Djamhuri. "Peran Teknologi Informasi Dalam Mengantisipasi Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus Pada PT XYZ Tbk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* (2017): 1–10.
- Antus, Sultan, Nasruddin Mohamma, and Olla Triana Agilga. "ANALISIS MERGER BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DENGAN PENDEKATAN MASLAHAH MURSALAH Perkembangan Ekonomi Di Indonesia Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek , Salah Satunya Ialah Pada Sektor Perbankan . Perbankan Yang Ada Saat Ini Di Indonesia Ada 2 ,” 1, no. 2 (2022): 319–350.
- Asbi Amin, Syamsuri Rahim, Muslim Muslim,. "Red Flag And Auditor Experience Toward Criminal Detection Trough Profesional Skepticism." *Jurnal Akuntansi* 23, no. 1 (2019): 46.
- Asep Nurwanda, Elisa Badriah. "Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) Di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 7, no. 1 (2020): 68–75. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/download/3313/pdf>.
- Asmara, Fransiska Tarasita. "KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI *FRAUD*: STUDI PADA PT BANK UOB INDONESIA" (2001): 1–22.
- Ayu Az-Zahra, Ratu Syiddah, Achmad Jaelani, and Mulyadi Nursi. "Pengaruh Pengendalian

Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta.” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 2, no.2 (2021): 38–44.

Asmara, F. (2020). KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI *FRAUD*: STUDI PADA PT BANK UOB INDONESIA. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 1(1),1-22.

Az-Zahra, R., Jaelani, A., & Nursi, M. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Integritas Karyawan Terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT. Bank KEB Hana Indonesia Wilayah Jakarta. *Jurnal Akutansi*, 1(1),1-8.

Bajuri, Diding. “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Desa Pagandon Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 6, no. 1 (2013): 145–170.

Christian, N. (2022). PENGGUNAAN TEKNIK AKUNTANSI FORENSIK DALAM PENDETEKSIAN DAN PENCEGAHAN OCCUPATIONAL *FRAUD*: KAJIAN LITERATUR. *JURNAL MANEKSI*, 11(1), 287-298.

Debi Novalia, Hidayatul Kahfi, and Rika Lidya. “PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENGANTISIPASI KECURANGAN AKUNTANSI (Studi Kasus Pada PT Bangkit Berkah).” *Jurnal Buana Akuntansi* 6, no. 1 (2021): 57–66.

Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.

Al Fasiri, Mawar Jannati. “Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah.” *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 236.

Festi, Theresa, Andreas, and Riska Natariasari. “Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan.” *Jom Fekom* Vol.1, No., no. 2 (2014): 1–16.
<https://media.neliti.com/media/publications/33470-ID-pengaruh-peran-audit-internal-terhadap-pencegahan-kecurangan-studi-empiris-pada.pdf>.

Hartono, Rudi. “KONSEP DAN PERHITUNGAN BAGI HASIL PADA PENGHIMPUNAN

- DANA (FUNDING) DI BANK SYARIAH.” *Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam* 4, no. 1 (2019): 1–22.
- Hasanah, R.A., and M. Latifah. “Investigasi Online Resilience Remaja: Eksplanasi Peranan Karakteristik Remaja, Karakteristik Keluarga, Kelekatan Remaja-Orang Tua, Regulasi Emosi, Dan Hubungan Persahabatan.” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 14, no. 3 (2021): 270–281.
- Hutami Ningsih, Nurul, Mella Handayani, and Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. “Pengaruh Auditor Internal, Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdapat Di Kota Palembang).” *Jurnal Akuntanika* 8, no. 1 (2022): 79–87. Ibrahim, Khudari. “Mudharabah Principle of Banking Products.” *IUS* 2, no. 4 (2014): 42–53.
- Indonesia, PT Bank Syariah. “Kebijakan Anti *Fraud* PT Bank Syariah Indonesia Tbk” (2019): 1–6.
- Iv, M U I, Alma Herdian, and Nurma Sari. “Penerapan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) XXX Ditinjau Dari Fatwa DSN No . 08 / DSN/IV/MUI 2000.” *Investasi Islam* 6, no. 2 (2021): 131–142.
- KNKS. “TREND Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis.” *Komite Nasional dan Keuangan Syariah*, 2020. <https://knks.go.id/satu-pusatdata/7?page=5>.
- Khasanah, T., & Iswanaji, C. (2022). GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN UPAYA MENURUNKAN INTERNAL *FRAUD* BRI SYARIAH. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(1),3173-3182.
- Lestari, Novita. “Prinsip Bagi Hasil Pada Perbankan Syari’ah.” *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1 (2015): 46–66.
- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah.” *Madani Syariah* 3, no. 2 (2020): 132–146.
- Makhfud, Ali. “Bank Syariah: Prinsip Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Madani Syariah* 1, no. 1 (2019): 103–118.

- Marimin, Agus, and Abdul Haris Romdhoni. "Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2017): 75–87.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2013): 202–216.
- Muzdalifah, Muzdalifah, and Nur Syamsu. "Red Flags, Task Spesific Knowledge Dan Beban Kerja Pada Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*." *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 6, no. 2 (2020): 92–101.
- Moleong, L. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Need, & Monitoring, I. (2018). Analisis Pengaruh *Fraud* Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 4(1), 1472-1486.
- Ngumar, S., Fidiana, F., & Retnani. (2019). Implications of Islamic governance on Islamic bank *fraud*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 226-239.
- Nandaningsih, Nadia, and Yuli Dwi Yusrani Anugrah. "Konsep Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah." *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 3, no. 1 (2021): 61.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–181.
- Novita, Natasia. "Analisis Strategi Anti-*Fraud* Di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Graha Pangeran Wilayah Surabaya." *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen dan Akuntansi)*, no. 2 (2019): 22–26.
- Prasetyo, Luhur. "Perkembangan Bank Syariah Pasca Uu." *AL-Tahrir* Vol 12, No (2012): 43–63.
- Prasetyo, Whedy. "PEMBIAYAAN PRINSIP BAGI HASIL, PRINSIP JUAL BELI DAN PRINSIP SEWA TERHADAP FALAH LABA" 15, no. 3 (2011): 456–465.
- Prabowo, H. (2020). Strategi Pengembangan Unit Anti *Fraud* PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Yogyakarta dalam Meminimalkan Occupational *Fraud*. *Skripsi Akutansi*, 1-98.
- Raharjanti, A., & Muharrami, R. (2020). The Effect of Good Corporate Governance and Islamicity Financial Performance Index of Internal *Fraud* Sharia Banking Period 2014-2017. *Journal of Business and Management Review*, 1(1),1-15.

- Ruchiatna, G., Midiastuty, P., & Suranta, E. (2020). Pengaruh karakteristik komite audit terhadap *fraudulent financial reporting*. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(4), 255-264.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.
- Rafael, Sarinah Joyce M., and I Komang Arthana. "Red Flags Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 8, no. 1 (2020): 57–72.
- Ruchiatna, Gading, Pratana Puspa Midiastuty, and Eddy Suranta. "Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen* 1, no. 4 (2020): 255–264.
- Saprida, Saprida. "Saprida, S. (2018). Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli. Mizan: Journal of Islamic Law, 4(1), 121–130. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177> Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–130.
- Sari, M. S., & Zefri, M. "Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, Dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura." *Jurnal Ekonomi* 21, no. 3 (2019): 308–315. <https://ejournal.borobudur.ac.id/index.php/1/article/view/608/583>.
- Sari, Widya. "Pengaruh Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Dan Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil Terhadap Performa Bisnis Pt Bank Bri Syariah." *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi* 12, no. 1 (2020): 133–148.
- Sakinah, G., & Ponirah, A. (2021). PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP INTERNAL FRAUD PADA PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK PERIODE 2015-2019. *Jurnal Likuid*, 1(2), 74-86.
- Sari, Y. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal Pemahaman Sanksi *Fraud* dan Sosialisasi Kesadaran Anti *Fraud* Terhadap Pelayanan Frontliner. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/view/1414%0Ahttps://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros/article/download/1414/838>
- Subhi, Galan Nur, and Indrawati Yuhertiana. "Peran SDM Dan Teknologi Informasi Pada

- Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI.” *Equity* 24, no. 2 (2021): 141.
- Sudarmanto, Eko, and Citra Kharisma Utami. “Pencegahan *Fraud* Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 195.
- Syawalina, Cut Fitrika. “Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Audit Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Distrik Navigasi Kota Sabang.” *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah* 10, no. 1 (2020): 80–88.
- Syukron, Ali. “Dinamika Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 28–53.
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan *Fraud* Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1593>
- Triwahyuni, Triwahyuni, and Anton Prasetyo. “Pencegahan *Fraud* Pada Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO)Tbk Kantor Cabang Gombang: Peran Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Dan Budaya Etis Organisasi.” *Accounting and Management Journal* 5, no. 2 (2021): 44–55.
- Zahara, Andi Yassha Malpa, and Novita. “Crowe’s *Fraud* Pentagon Dalam Mengindikasikan Kecurangan Laporan Keuangan.” *E-Prosiding Akuntansi* 53, no. 9 (2019): 1689–1699.
- Zahara, A. Y. M., & Novita. (2019). Crowe’s *Fraud* Pentagon dalam Mengindikasikan Kecurangan Laporan Keuangan. *E-Prosiding Akuntansi*, 53(9), 1689–1699. <http://www.trilogi.ac.id/journal/ks/index.php/EPAKT/article/view/766>.

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan Wawancara

Narasumber Satu

Nama : Rayza PurwoJabatan: Back Office

Tanggal Wawancara : Senin, 21 November 2022

4.2.2. Bagaimana SOP atau mekanisme penerapan strategi anti *fraud* di PT.Bank Syariah Indonesia KC Semarang MT Haryono ? Apakah bapak bisa menjelaskannya ?Jawaban :

Kalau mengenai SOP sendiri ya mba saya kalau kami tetap mengacu pada pusat. SOP nya sendiri sudah sesuai yang telah ditetapkan oleh pusat.

4.2.3. Apakah ada surveilance system? Jika ada surveilance sytem atau melakukan pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*, di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono melakukannya dengan seperti apa?

Jawaban :

Setahu saya tidak pernah mba. Hal itu biasanya dilakukan oleh tim audit sendiri mba. Biasanya hal itu dilakukan dengan waktu yang tidak menentu mbak tergantung kebutuhannya sendiri mbak.

4.2.4. Kalau know your employee di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono seperti apa?

Jawaban

Kalau know your employee sendiri itu mba, kita harus mengetahui latar belakang kehidupannya karyawan seperti apa. Misalnya dia hanya berlatar belakang dengan keluarga yang biasa akan tetapi hidupnya cukup hedon dan hanya bekerja di BSI maka hal itu perlu ditelusuri

lagi mba.

4.2.5. Bagaimana hubungan RBC (regional business control) dan IAG (Internal Audit dan Anti *fraud* Group) seperti apa koordinasinya secara struktural ?

Jawaban

Setahu saya ya mba, RBC dan IAG itu di bagian area. Dan saya sendiri berada di bagian operasional, kalau masalah koordinasinya saya kurang paham tapi setahu saya kalau di setiap pegawai BSI itu koordinasinya selalu baik dan sudah sesuai dengan bidangnya.

4.2.6. Untuk pelatihan/ training di BSI KCP MT Haryono sendiri khususnya untuk yang menangani anti *fraud* seperti apa?

Jawaban

Kalau pelatihan di bidang yang menangani anti-*fraud* sendiri saya kurang tahu mba akan tetapi biasanya pertahun itu ada mbak tergantung dari BSI pusat. Akan tetapi kita diberi pelatihan sesuai dengan bidangnya. Dan seluruh pegawai pun tetap mendapatkan sosialisasi anti-*fraud* dari pihak yang menangani anti-*fraud* mbak dan tujuannya agar pegawai dapat menerapkan perilaku anti-*fraud* tersebut.

4.2.7. Mengenai sertifikasi pegawai di BSI KCP MT Haryono khususnya untuk temen-teman RBC/ anti *fraud* seperti apa, jenis2 sertifikasinya ?

Jawaban

Kalau mengenai sertifikasi sendiri setiap tahunnya itu ada mba. Nanti dari kami diberi tes untuk mendapatkan sertifikasi itu.

4.2.8. Apakah RBC memiliki fungsi lain selain anti *fraud* ?

Jawaban

Setahu saya ya mbak RBC itu tugasnya kurang lebih seperti itu mba yang menangani tentang anti-*fraud*, mitigasi risiko, baik dari segi penerapannya atau pelaksanaan. Selain itu setahu saya yang menangani kasus anti *fraud* itu audit dan AMLO mbak. AMLO itu adalah Anti Money Laundering Officer yang bertugas untuk pelaksanaan implementasi program APU PPT. Program APU PPT itu sendiri adalah singkatan dari Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

4.2.9. Ketika ada kecurangan internal yang memberrikan sanksi itu siapa pak atau dalam hal penanggung jawabannya?

Jawaban

Kalau masalah ini langsung dari pusat mbak atau direksi kalau dari kita melaporkan.

4.2.10. Bagaimana penerapan strategi anti *fraud* pada setiap karyawan?

Jawaban

Kalau penerapannya sendiri mba dari kita itu salah satunya adalah tidak menerima risywah dari nasabah ataupun hal yang lainnya. Penerapannya sendiri itu pada setiap karyawan tergantung pada individu masing-masing mba. Dari awal pun juga kita telah diberikan sosialisasi mengenai anti *fraud* itu seperti apa dan sanksinya itu seperti apa

4.2.11. Ketika ada karyawan/pegawai baru di BSI KCP MT Haryono apakah diberi pelatihan/training?

Jawaban

Kalau disini mba setiap ada karyawan/pegawai baru tentunya dilakukan pelatihan/training selama 2 minggu. Dan untuk pegawai yang lama itu tergantung mbak hal itu tidak menentu waktunya.

4.2.12. Menurut bapak, pengamanan yang dilakukan atau diterapkan oleh BSI KCP MT Haryono apakah sudah cukup aman atau perlu ditingkatkan lagi?

Jawaban

Kalau menurut saya sih mbak sudah cukup aman, apalagi kami dilengkapi oleh beberapa security atau pun cctv. Dan kalau dari sistemnya sendiri kalau di kantor KCP MT Haryono tidak memiliki IT akan tetapi langsung ditangani oleh pusat langsung.

4.2.13. Kalau whistleblowing itu sendiri seperti apa pak?

Jawaban

Jadi platformnya itu tidak diketahui gitu mbak, ada dari email, whatsapp, atau nomor telepon dan nanti akan dirahasiakan Ketika dilaporkan melalui platform itu

4.2.14. Kalau mengenai sosialisasi anti-*fraud* sendiri itu seperti apa pak?

Jawaban

Yang itu tadi mba, disini lain Ketika RBC (Regional Bussines Control) melakukan pemeriksaan pastinya mereka melakukan sosialisasi anti *fraud*.

4.2.15. Kalau mengenai surprise audit itu seperti apa pak?

Jawaban

Kalau dari Kanwil sendiri atau dari kantor wilayah itu menetapkan bahwa setiap akhir bulan itu ada surprise audit akan tetapi bukan dari RBC melainkan Para Branch Manager ke cabang-cabang seperti melakukan crosscheck, opnam kas, opnam gadai dll. Berbeda dengan RBC sendiri yang melakukan seluruh hal sampai halnya dengan pembiayaan.

4.2.16. Kalau menurut bapak sendiri, bagaimana cara melakukan pengembangan SDM terhadap anti-*fraud*?

Jawaban

Kalau menurut saya mba, Kembali kepada diri sendiri mba. Selalu mengingat amanah yang diberikan kepada kita apalagi kita sendiri berlabel Syariah dan harus lebih menguatkan iman.

4.2.17. Menurut bapak, apakah SDM BSI KCP MT Haryono sudah menjalankan tupoksinya dengan baik?

Jawaban

Menurut saya sudah menjalankan tupoksinya dengan baik dengan bidangnya masing-masing.

4.2.18. Apakah pernah terjadi kecurangan/*fraud* di BSI KCP MT Haryono?

Jawaban

Alhamdulillah belum pernah si mba di BSI KCP MT Haryono dan jangan sampai ada.

4.2.19. Setahu saya pak dulu disini BRI Syariah dan itu sebelum merger Kalau sebelummerger apa pernah terjadi *fraud* pak?

Jawaban

Kalau dulu kan masih supervisi dan masih BRI Syariah itu pernah terjadi. dan mohon maaf saya tidak bisa menjelaskan mba masalahnya apa karena ini hal privasi.

4.2.20. Kalau di BSI KCP MT Haryono sendiri strategi apa yang diterapkan?

Jawaban

Sesuai SOP tadi sih mbak.

Narasumber Dua

Nama : Mohammad Muchlisin
Jabatan : Customer Supervisi

Tanggal Wawancara: Senin, 21 November 2022

- 1. Bagaimana SOP atau mekanisme penerapan strategi anti *fraud* di PT.Bank Syariah Indonesia KC Semarang MT Haryono ? Apakah bapak bisa menjelaskannya ?**

Jawaban

Kalau SOP penerapan strategi anti-*fraud* di pt. bank Syariah Indonesia KC semarang MT Haryono sendiri itu mba kita tetap mengikuti atau berpacu pada BSI pusat. Dan salah satunya itu mbak, kita tidak boleh menerima sepeser pun dari nasabah, baik berupa hadiah ataupun lainnya. Selain itu kita juga mereview SOP nya setiap pertiga bulannya. Kita melakukannya dengan berbagai cara seperti laporan pengendalian internal operasional, lost event database, menilai risiko yang akan terjadi.

- 2. Apakah ada surveilance system? Jika ada surveilance sytem atau melakukan pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*, di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono melakukannya dengan seperti apa?**

Jawaban

Tidak pernah mba. Biasanya kalau survey itu Masalah ini yang akan memeriksa dari pihak

audit, ada system whistleblowing (whistle blowing ini misalnya adanya aduan-aduan dari setiap pegawai, dan system whistleblowing ini nanti yang akan meneruskan ke audit. Di dalam system whistle blowing ini Ketika pelapor dan yang terlapor akan dirahasiakan oleh whistleblowing ini. Jadi yang hanya mengetahui adalah pihak auditor dan system whistleblowing.

3. Kalau know your employee di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono seperti apa?

Jawaban

Kalau know your employee sendiri itu mba, Disini kepala unit kerja harus mengetahui karakter setiap pegawai atau karyawannya, seperti kebiasaannya setiap harinys seperti apa, backgroundnya seperti apa, agar Ketika terjadinya *fraud* kita dapat mencegah terjadinya hal tersebut. Contoh nya Ketika halnya seseorang tersebut hanya bekerja di bank, akan tetapi gaya hidupnya sangat tinggi dan hedon seperti membeli tas branded dan lain-lain.

4. Bagaimana hubungan RBC (regional business control) dan IAG (Internal Audit dan Anti *fraud* Group) seperti apa koordinasinya secara struktural ?

Jawaban

Setahu saya ya mba, RBC itu tingkatnya regional, area, cabang dan masih bisa dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinan regional dan IAG sendiri itu lebih ke independent.

5. Untuk pelatihan/ training di BSI KCP MT Haryono sendiri khususnya untuk yang menangani anti *fraud* seperti apa?

Jawaban

Kalau pelatihan di bidang yang menangani anti-*fraud* sendiri saya kurang tahu mba akan tetapi biasanya pertahun itu ada mbak tergantung dari BSI pusat. Akan tetapi kita diberi pelatihan sesuai dengan bidangnya. Dan seluruh pegawai pun tetap mendapatkan sosialisasi anti-*fraud* dari pihak yang menangani anti-*fraud* mbak dan tujuannya agar pegawai dapat menerapkan perilaku anti-*fraud* tersebut.

6. Mengenai sertifikasi pegawai di BSI KCP MT Haryono khususnya untuk temen- teman RBC/ anti *fraud* seperti apa, jenis2 sertifikasinya ?

Jawaban

Kalau mengenai sertifikasi sendiri lebih mengenai ke kompetensi ya mba. Kalau sertifikasi auditor juga saya kurang tahu mbak. Kalau mengenai sertifikasi bagi pegawai kalau di level-level tertentu pasti ada Namanya uji kompetensi tentang perbankan Syariah, dan kalau di bagian yang mengambil keputusan berarti sertifikasinya manajemen risiko. Dan manajemen risiko itu pun bertahap dan mempunyai level-level.

7. Apakah RBC memiliki fungsi lain selain anti *fraud* ?

Jawaban

Setahu saya ya mbak RBC memang seperti itu tugasnya. Akan tetapi seluruh pegawai/karyawan bisa berfungsi sebagai anti *fraud* melalui platform whistleblowing tadi.

8. Ketika ada kecurangan internal yang memberikan sanksi itu siapa pak atau dalam hal penanggung jawabannya?

Jawaban

Kalau masalah ini langsung dari pusat mbak atau direksi dan dari regional akan melaporkan kecurangan tersebut. Kalau mengenai punishmentnya yang lebih tau adalah RBC dan tentunya pasti ke ranah hukum mbak.

9. Bagaimana penerapan strategi anti *fraud* pada setiap karyawan?

Jawaban

Kalau penerapannya salah satunya adalah kita dilarang untuk menerima risywah dari nasabah. Misalnya unit kerja pembiayaan mencairkan pembiayaan kita dilarang untuk menerima walaupun sepersen atau sepeser pun dari nasabah yang menerima pembiayaan. Dan hal itu memang sudah diatur dalam mekanisme penerapan anti *fraud*.

10. Ketika ada karyawan/pegawai baru di BSI KCP MT Haryono apakah diberi pelatihan/training?

Jawaban

Kalau disini pasti ada mbak untuk karyawan/pegawai baru tentunya dilakukan pelatihan/training. Akan tetapi kalau disini belum ada si mbak kemarin adanya dikantor pusat dan dilakukan sampai 3 bulan pelatihan/training. Dan untuk pegawai yang lama kalau di operasional

sendiri setiap minggu ada sharing seccion, dan di bagian pembiayaan juga ada di setiap minggu atau bulannya.

11. Menurut bapak, pengamanan yang dilakukan atau diterapkan oleh BSI KCP MT Haryono apakah sudah cukup aman atau perlu ditingkatkan lagi?

Jawaban

Kalau menurut saya sih mbak sudah cukup aman, kalau di sistemnya sendiri sudah ada tim pelaporannya, pemantauannya yang setiap bulan dievaluasi bahkan setiap minggu dalam pengevaluasiannya.

12. Selain whistleblowing, hal apa lagi yang dilakukan di bank KCP MT Haryono dalam mengatasi *fraud* pak?

Jawaban

Setahu saya sih mbak manajemen risiko, sosialisasi dari IAG dan RBC terkait *fraud*, seperti potensi-potensi terjadinya *fraud*, dan lain-lain.

13. Kalau mengenai sosialisasi anti-*fraud* sendiri itu seperti apa pak?

Jawaban

Ketika RBC (Regional Bussines Control) dan IAG melakukan sosialisasi tentunya mereka mempunyai tugas untuk mengingatkan hal-hal *fraud* apa yang pernah terjadi dan harus dijadikan pembelajaran agar tidak terjadinya *fraud*.

14. Kalau menurut bapak sendiri, bagaimana cara melakukan pengembangan SDM terhadap anti-*fraud*?

Jawaban

Kalau menurut saya sering melakukan pelatihan, peningkatan kompetensi perbankan, kompetensi dan layanan.

15. Menurut bapak, apakah SDM BSI KCP MT Haryono sudah menjalankan tupoksinya dengan baik?

Jawaban

Menurut saya sudah menjalankan tupoksinya dengan baik dengan bidangnya masing-masing dan harus tetap lebih konsisten dan semangat.

16. Menurut bapak, titik keberhasilan di BSI KCP MT Haryono itu sendiri seperti apa pak?

Jawaban Kalau menurut saya simple mba, Ketika hal itu target di bidang masing-masing itu sudah tercapai dan terus konsisten terhadap pencapaiannya. Misalnya di bidang operasional yaitu aspek pelayanan.

17. Apakah pernah terjadi kecurangan/*fraud* di BSI KCP MT Haryono?

Jawaban

Alhamdulillah belum pernah terjadi di BSI KCP MT Haryono dan jangan sampai ada terjadi.

18. Setahu saya pak dulu disini BRI Syariah dan itu sebelum merger. Kalau sebelum merger apa pernah terjadi *fraud* pak?

Jawaban

Kalau sebelum merger pasti ada mbak dan pasti sudah sampai ke ranah hukum juga. Kalau permasalahannya saya bukan orang tepat untuk menjawab dan setahu saya terkait pada hal pembiayaan.

19. Kalau di BSI KCP MT Haryono sendiri strategi apa yang diterapkan?

Jawaban

Sesuai SOP tadi sih mbak.

Narasumber Ketiga

Nama : Hanif Kurniawan

Jabatan : CBRM (Consumer Bussiness Relationship Manager) Waktu wawancara : Senin,
21 November 2022

- 1. Bagaimana SOP atau mekanisme penerapan strategi anti *fraud* di PT.Bank Syariah Indonesia KC Semarang MT Haryono ? Apakah bapak bisa menjelaskannya ?**

Jawaban

Kalau SOP penerapan strategi anti-*fraud* di pt. bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono sendiri itu mba kita tetap mengikuti atau berpacu pada BSI pusat. Diantaranya itu kita tidak menerima uang, bingkisan, apapun dari nasabah, baik selama proses hingga akhir proses pencairan. Selain itu kita juga sekarang ada 3 pilar yaitu ada bisnis, AFO, dan risk yang akan menangani dan terjadinya *fraud*.

- 2. Apakah ada surveilance system? Jika ada surveilance sytem atau melakukan pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti *fraud*, di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono melakukannya dengan seperti apa?**

Jawaban

Tidak pernah mba. Tapi Biasanya kalau survey itu hal ini ditangani oleh pihak audit mba. Jadi Ketika pembiayaannya itu telah cair ke nasabah nantinya akan audit dari internal dan menanyakan ke nasabah tentang pembiayaannya tersebut apakah sudah sesuai atau tidak dengantujuan atau prosedurnya.

- 3. Kalau know your employee di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MTHaryono seperti apa?**

Jawaban

Kalau know your employee sendiri itu bis akita lihat dari gaya hidupnya pegawai/karyawan tersebut mba, misalnya dia hanya bekerja di BSI dan tidak mempunyai penghasilan selain dari BSI dengan gaji 3 juta, lalu dia bisa ganti hp secara cepat dengan mengikuti trend hingga membeli branded. Hal itu harus kita ketahui.

- 4. Untuk pelatihan/ training di BSI KCP MT Haryono sendiri khususnya untuk yangmenangani anti *fraud* seperti apa?**

Jawaban

Kalau pelatihan di bidang yang menangani anti-*fraud* sendiri saya kurang tahu mba akan tetapi biasanya pertahun itu ada mbak tergantung dari BSI pusat. Akan tetapi kita diberi pelatihan sesuai dengan bidangnya. Dan seluruh pegawai pun tetap mendapatkan sosialisasi anti-*fraud* dari pihak yang menangani anti-*fraud* mbak dan tujuannya agar pegawai dapat menerapkan perilaku anti-*fraud* tersebut.

5. Mengenai sertifikasi pegawai di BSI KCP MT Haryono khususnya untuk teman-teman RBC/ anti *fraud* seperti apa, jenis2 sertifikasinya ?

Jawaban

Kalau mengenai sertifikasi sendiri nantinya ada pelatihan-pelatihan dari pusat yang memiliki tes dan nantinya memiliki sertifikasi. Dan Ketika telah memiliki sertifikasi itu tidak di tes lagi, akan tetapi melakukan refreshment dalam waktu 1 tahun itu dan entah berapa kali dalam setahun.

6. Apakah RBC memiliki fungsi lain selain anti *fraud* ?

Jawaban

Setahu saya ya mbak RBC memang seperti itu tugasnya. Dan dari audit eksternal pun juga ada mbak.

7. Ketika ada kecurangan internal yang memberikan sanksi itu siapa pak atau dalam hal penanggung jawabannya?

Jawaban

Kalau yang memberikan sanksi sendiri dari kantor pusat mbak. Contohnya ada SP 1 sampai dengan SP3.

8. Bagaimana penerapan strategi anti *fraud* pada setiap karyawan?

Jawaban

Kalau strateginya sih mbak menurut saya bekerja sesuai dengan jabatannya yaitu amanah dan jujur. Dan Kembali lagi seperti tadi mbak tidak boleh menerima uang ataupun risywah dari nasabah dalam bentuk apapun.

9. Ketika ada karyawan/pegawai baru di BSI KCP MT Haryono apakah diberi pelatihan/training?

Jawaban

Kalau disini pasti ada mbak untuk karyawan/pegawai baru tentunya dilakukan pelatihan/training. Biasanya untuk pegawai baru yang diberikan pelatihan/training pertama yaitu sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu dn itu dari kantor pusat. Dan untuk pegawai yang lama itu tergantung si mbak.

10. Menurut bapak, pengamanan yang dilakukan atau diterapkan oleh BSI KCP MT Haryono apakah sudah cukup aman atau perlu ditingkatkan lagi?

Jawaban

Kalau menurut saya sih mbak sudah cukup aman, sudah ada securitynya, laporannya, berangkas, dan Ketika tutup buku laporan di teller itu tidak satu orang dan harus didampingi oleh BOSM (Branch Operating and Service Manager).

11. Menurut bapak whistleblowing itu seperti apa?

Jawaban

Kalau menurut saya mbak, whistleblowing itu saya ibaratkan seperti kotak surat. Jadi nantinya pegawai/karyawan yang melapor atau pelapor akan dirahasiakan identitasnya seperti halnya dengan kotak surat. Selain system whistleblowing ini yah tadi itu si mbak, melalui audit dan RBC. Dan Ketika ada cuti pegawai, pegawai tidak boleh sama sekali membuka system di luar jam kerja. Dan selama cuti pun Ketika ada penggantinya dan membuka sistemnya dan alhasil terjadi kecurangan maka hal itu bisa dilaporkan.

12. Kalau mengenai sosialisasi anti-*fraud* sendiri itu seperti apa pak?

Jawaban

Ketika RBC (Regional Bussines Control) dan IAG dating dan melakukan sosialisasi dan diberikan arahan-arahan mengenai *fraud* tersebut dan paling dilakukan 1 kali dalam setahun.

13. Kalau menurut bapak sendiri, bagaimana cara melakukan pengembangan SDM terhadap anti-*fraud*?

Jawaban

Kalau menurut saya sendiri karena kita kerja di berlabel Syariah maka kita tanamkan nilai-nilai syariahnya jangan sampai kita mengejar target lalu kesyariahannya kita tinggal, kesejahteraan karyawan diperhatikan atau saling membantu dan merangkul antar sesama pegawai.

14. Menurut bapak, apakah SDM BSI KCP MT Haryono sudah menjalankan tupoksinya dengan baik?

Jawaban

Menurut saya sudah menjalankan tupoksinya dengan baik dengan bidangnya masing-masing.

15. Menurut bapak, titik keberhasilan di BSI KCP MT Haryono itu sendiri seperti apa pak?

Jawaban

Kalau menurut saya Ketika hal itu target di bidang masing-masing itu sudah tercapai dan kesyariahaannya tercapai itu sudah cukup bagi saya pada intinya bisa membawa berkah dan terus konsisten terhadap pencapaiannya.

16. Apakah pernah terjadi kecurangan/*fraud* di BSI KCP MT Haryono?

Jawaban

Alhamdulillah belum pernah terjadi di BSI KCP MT Haryono dan jangan sampai ada terjadi. Mungkin pernah terjadi tidak sesuai tujuan saja tapi yang tidak merusak dari pihak manapun.

17. Setahu saya pak dulu disini BRI Syariah dan itu sebelum merger, Kalau sebelum merger apa pernah terjadi *fraud* pak?

Jawaban

Kalau sebelum merger pasti ada mbak. Dan waktu BRI Syariah itu dulu cabang sehingga membawahi beberapa kantor pembantu. Mungkin di kantor cabang tidak melakukan akan tetapi

yang melakukan adalah kantor pembantu.

18. Kalau di BSI KCP MT Haryono sendiri strategi apa yang diterapkan?

Jawaban

Sesuai SOP tadi sih mbak. Dan intinya itu kita saling meningkatkan antar sesama karyawan atau pegawai jangan sampai melakukan hal yang menyimpang.

Narasumber Keempat

Nama Lengkap : Yusuf Suwandi

Jabatan : RBC (Regional Bisnis Control) Tanggal wawancara : Jum'at 25 November 2022

1. Bagaimana SOP atau mekanisme penerapan strategi anti *fraud* di PT.Bank Syariah Indonesia KC Semarang MT Haryono ? Apakah bapak bisa menjelaskannya ?

Jawaban

Kalau penerapan/mekanisme strategi anti-*fraud* sendiri itu yaitu :

a. Yang pertama ada sosialisasi anti *fraud* mba, itu kita sendiri mempunyai program yang melakukan kunjungan setiap bulan ke cabang-cabang untuk melakukan sosialisasi pencegahan dini anti *fraud*. Disini kita membahas berbagai hal antara lain risiko, modus, *fraud*, sanksi-sanksi yang diterima, baik di bagian operasional, pembiayaan, dan lain-lain. Kita menekankan adanya *fraud* awrness adanya pecegahan dini sebelum terjadinya pelanggaran maka kita fokusnya pada sosialisasi ini yang menekankan jangan sampai terjadinya pelanggaran. Dan hendaknya setiap pegawai atau karyawan itu mengetahui fungsi jabatan mereka dan kita sebagai unit anti *fraud* atau RBC mengingatkan kepada selueuh pegawai/karyawan agar tidak melakukan pelanggaran. Jadi fungsinya sosialisasi itu ke cabang-cabang dari awal ya mba, agar karyawan/pegawai mengetahui, memahami, mengimplementasikan operasional atau pembiayaan sesuai prosedurnya.

b. Yang kedua welcoming call, welcoming call sendiri merupakan Ketika ada pelaporan dari suatu pihak makan dari unit anti *fraud* sendiri yang menindak lanjuti.

c. Yang ketiga pengaduan whistleblower yang merupakan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran atau adanya kasus-kasus maka bisa diadukan lewat whistleblower. Kalau adanya kasus-kasus yang tidak mengakibatkan kerugian yang berupa materi atau finansial bagi bank atau nasabah maka kita memberikan Surat peringatan 1 sampai surat peringatan 3.

2. Apakah ada surveillance system?

Jawaban

Kalau mengenai surveillance system itu banyak mba tapi kita disini belum pernah melakukan tanpa sepengetahuan bank KCP MT Haryono. Salah satu surveynya sendiri itu seperti survey system, survey SDM, survey kepuasan, dan lain-lain. Contoh salah satunya satu mengenai survey system itu prosesnya cepat atau lambat seperti proses di teller dari awal penginputan sampai berakhirnya penyelesaian berkas atau SLA nya cepat atau lambat.

3. Kalau know your employee di PT.Bank Syariah Indonesia KCP Semarang MT Haryono itu seperti apa pak?

Jawaban

Kalau disini sendiri mbak, kita mengetahui tentang latar belakang dari karyawan tersebut si mba. Entah dari gaya hidupnya atau keluarganya. Kalau kita disini sendiri pun sudah saling mengetahui mba misalnya kendaraanya pun kita sudah tahu itu kendaraannya siapa.

4. Bagaimana hubungan koordinasi secara struktural antara RBC (regional business control) dan IAG (Internal Audit Group)?

Jawaban

Kalau hubungan RBC dan IAG itu hanya koordinasi saja. Kalau RBC sendiri strukturnya mengikut pada regional/kanwil jadi kalau kita dengan audit itu hanya koordinasi saja.

5. Whistleblowing itu seperti apa pak?

Jawaban

Whistleblowing sendiri itu khusus kalau ada pelanggaran atau pengaduan. Dan

whistleblowing ini siapa saja yang bisa melaporkan dan whistleblowing sendiri memiliki nomor-nomor khusus dan yang hanya memiliki dan yang melihat laporan itu adalah direksi dan audit. Dan whistleblowing ini, pegawai yang melapor atau pegawai yang terlapor akan dirahasiakan atau tanpa diketahui. Dari penerapan whistleblowing sendiri itu ada mba di KCP MT Haryono, dan telah tersistem mba pake web online di seluruh Indonesia, dan nantinya siapa saja yang dapat melapor melalui whistleblowing ini.

6. Apakah ada pelatihan/training dalam pengembangan SDM khususnya pada unitkerja anti *fraud*?

Jawaban

Kalau kita mba setiap tahun itu ada pelatihannya. Pelatihannya itu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya teller, customer service sendiri itu ada pelatihannya. Akan tetapi, kalau dalam pelaksanaan bulannya itu, itu tidak menentu mba kapan waktu pelaksanaannya.

7. Bagaimana pelaksanaan proses pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut diBSI KCP MT Haryono?

Jawaban:

Dari kit aitu mba ada 3 lini :

a. Yang pertama itu pihak cabang sebagai gawang pertama atau control pertama untuk memastikan segala transaksi telah terlaksana sesuai ketentuan atau prosedurnya.

b. Yang kedua, ada RBC sebagai gawang kedua jika ada kelolosan dalam hal tersebut atau yang kurang maka RBC yang menghandle atau yang menangani.

c. Yang ketiga ada audit sebagai gawang ketiga. Akan tetapi mba, RBC sendiri juga terkadang berada di posisi pertama. Hal itu karena sesuai kebutuhan dari cabang sendiri itu apa, maka RBC sendiri yang akan membantu cabang pada hal tersebut.

8. Bagaimana pelaksanaan investigasi, pelaporan dan sanksi di KCP MT Haryono?

Jawaban

Dalam pelaksanaan itu ada 5 tahap atau stage. Yang pertama ada penelaahan awal yang dimana penunjukkan petugas BSI sebagai investigatornya, yang kedua pengumpulan data, berkas-berkas, dokumen, informasi, yang ketiga OTS hubungan, seperti hubungan ke APK, yang keempat yaitu pembuatan laporan-laporan hingga selesai, dan yang kelima adalah penyampaian laporan hingga dari penyampaian laporan itu terdapat keputusan berupa sanksi. Selain itu yang akan memberikan sanksi itu dari tim pusat atau kantor pusat.

9. Apa ada rotasi pegawai di KCP MT Haryono pak?

Jawaban

Ada mbak. Setiap tahun itu pasti ada rotasi pegawai. Seperti pimpinan cabang Branch Manager, karyawan ataupun lainnya. Dan biasanya itu mba dilakukan 3 kali rotasi dalam waktu 1 tahun.

10. Kalau mengenai identifikasi dalam proses penilaian risiko itu seperti apa pak?

Jawaban

Dalam proses identifikasinya itu mba risiko itu muncul Ketika adanya akar permasalahan. Misalnya Ketika ada suatu permasalahan tnetunya kita mengidentifikasi akar permasalahannya, kelemahan permasalahannya, dan lain-lain. Ketika akar permasalahannya itu ketemu mbak baru kita kembangkan permasalahan tersebut lalu kita perbaiki.

11. Bagiamna cara menumbuhkan budaya dalam melaporkan perilaku Anti *Fraud* ?

Jawab

Kalau di BSI ini sendiri setiap pagi sebelum bekerja, kita itu ada briefing. Nah di briefing sendiri ini mbak, adanya pembacaan doa Bersama, pemaparan nilai-nilai perusahaan, pemaparan visi dan misi, pemaparan budaya kerja, sharing knowledge, dan lain-lain. Hal itu kami lakukan pada tiap pagi hari sebelum bekerja.

12. Bagaimana Hambatan yang dihadapi tim anti *fraud* dalam mengindikasi kecurangan?

Jawaban

Kalau mengenai hambatan, belum cukup sulit. Karena kalau disini sendiri mba, kejadian *fraud* disini atau pelanggaran itu sangat jarang sekali. Tugas kitapun juga jadi ringan.

13. Apakah kecurangan internal pernah terjadi?

Jawaban

Selama saya bekerja dari tahun 2015 disini belum ada baik setelah merger atau sebelum merger. Seumpama pun kalau ada paling kesalahan itu terjadi karena kesalahan administrasi saja. BRI syariahnya sendiri pada tahun 2009.

14. Apakah SDM di BSI sendiri harus memiliki sertifikasi bagi pegawai?

Jawaban

Iya mba, harus. Minimal setingkat officer itu ada sertifikasi manajemen risiko tingkat pertama.

15. Apakah ada saran yang perlu dilakukan unit anti *fraud* kedepannya dalam melaksanakan strategi anti *fraud*?

Jawaban

Menurut saya, dalam kebutuhan harusnya melaksanakan training atau pelatihan, pembelajaran agar bisa memperdalam ilmunya. Dan dalam pengembangan strateginya saya rasa harus memiliki pengembangan karena terkait SDM Bisnis Control itu SDMnya terbatas. Jadi ketika pemeriksaan ke cabang-cabang juga membutuhkan waktu. Bisnis control officer disini Cuma ada 3 orang seluruh semarang kota. 3 orang itu bisnis control officer dan 1 orang itu staff bisnis control.

16. Kalau di bsi KCP Semarang MT haryono sendiri apakah memiliki struktur tersendiri tentang unit kerja anti *fraud*?

Jawaban

Kalau mengenai struktur, itu tidak ada strukturnya mba. Yang memiliki strukturnya adalahhanya regional dan pusat.

Dokumentasi





Surat Izin Riset Dan Surat Penerimaan Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website: febi.walisongo.ac.id – Email: febi@walisongo.ac.id

Nomor : 3746/Un.10.5/D1/PG.00.00/11/2022

17 November 2022

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Riset / Penelitian

Yth.

Pimpinan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Semarang MT Haryono
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : NUR AWALIA SETIANINGSIH
Nim : 1905036018
Semester : VII
Jurusan / Prodi : S1 PERBANKAN SYARIAH
Alamat : JL.SUKAWATI, KEC.TANETE RIATTANG BARAT,
KELURAHAN MACEGE, KAB.BONE
Tujuan penelitian : GUNA MENYELESAIKAN SKRIPSI
Judul skripsi : ANALISIS IMPLEMENTASI STRATEGI ANTI-FRAUD
PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KCP
SEMARANG MT HARYONO
Waktu penelitian : 21-25 NOVEMBER 2022
Lokasi penelitian : PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP SEMARANG
MTHARYONO
JL. MT. HARYONO NO.657, WONODRI, KEC. SEMARANG
SEL., KOTA SEMARANG, JAWA TENGAH 50242

Demikian surat permohonan izin riset ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kemahasiswaan,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

22 Desember 2022
No. 02/2151-3/8007A

Kepada :
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jl. Prof Dr Hamka Kampus III
Ngaliyan, Semarang

Perihal : **INFORMASI PERSETUJUAN IJIN PENELITIAN DI BSI AREA SEMARANG KOTA**
Reff : Surat RO VII Semarang No. 02/2540-3/RO VII Informasi Persetujuan Ijin Penelitian di Area Semarang Kota

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff senantiasa dalam keadaan sehat wal'afiat dan mendapat taufik serta hidayah dari Allah SWT.

Merujuk referensi di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan penelitian dapat disetujui dengan keterangan sebagai berikut:

No	Nama/NIM	Unit Kerja	Tanggal Pelaksanaan
1	Nur Awalia Setianingsih / 1905036018	KCP Semarang MT Haryono	Maksimal 3 Bulan


1. Peserta harus mematuhi UU Perbankan No tahun 1998 serta ketentuan intern Bank Syariah Indonesia yang menyangkut prinsip-prinsip kerahasiaan Bank.
2. Peserta hanya dapat memperoleh data untuk kepentingan ilmiah dan yang bersangkutan tidak diperkenankan menyebarkan ke pihak lain.
3. Peserta tidak diperkenankan menyalin (*fotocopy*) data dan membuat salinan dokumen nasabah untuk kepentingan pribadi.
4. Peserta melaksanakan magang selama maksimal jangka waktu 3 (tiga) bulan.
5. Peserta magang dibawah bimbingan dan pengawasan seorang pejabat Bank.
6. Peserta magang menyerahkan 1 (satu) buah *copy* hasil riset yang telah diperiksa/disetujui oleh Pembimbing dan Pejabat Bank Syariah Indonesia.
7. Peserta wajib menandatangani **Surat Pernyataan** bermaterai (terlampir).

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
AREA SEMARANG KOTA


Zen Assegaf
Area Manager


Syukri Ni'ami
AOSM

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Awalia Setianingsih

Tempat Tanggal Lahir : Watampone, 14 Agustus 2002

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : JL.Sukawati, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab. Bone, Sulsel.



Jenjang Pendidikan

SDN 10 UNGGULAN MANURUNGE (2008-2014)

MTS AL IKHLAS UJUNG BONE (2014-2016)

MA AL IKHLAS UJUNG BONE (2016-2019)

Pengalaman Organisasi

OSIS/OSAI MA AL IKHLAS UJUNG BONE (Bendahara) 2018-2019
BILIK ILMIAH (Anggota Kimia) 2017-2019

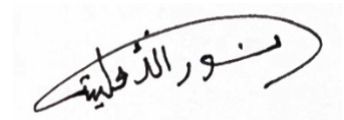
HMJ S1 PERBANKAN SYARIAH UIN WALISONGO (Koor Kominfo) 2020-2021

PMII Rayon Ekonomi Komisariat UIN Walisongo (Kadiv Kewirausahaan) 2021-2022
DEMA FEBI UIN Walisongo (Menteri Kominfo) 2022

Ikatan Keluarga Sulawesi (Sekretaris) 2021-2022

Semarang, 28 November 2022

Penulis



Nur Awalia Setianingsih

